

KK  
KKB  
CP. 13/112

Ilmu Sosial

mor  
17

**LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING  
TAHUN ANGGARAN 2011**



**MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN NIR-KEKERASAN  
DI KOTA MAKASSAR**

**Peneliti :**

**Ucu Martanto, S.IP., M.A.**

**Sukri, S.IP., M.A.**

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional,  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing  
Nomor : 004/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 14 April 2011

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2011**

## Identitas dan Pengesahan

### 1. Judul

### MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN NIR-KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR

### 2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Ucu Martanto, SIP., MA.  
 b. Jenis Kelamin : Laki-laki  
 c. NIP : 197903272009121003  
 d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli/III b  
 e. Jabatan Struktural : -  
 f. Bidang Keahlian : Konflik dan Kekerasan  
 g. Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik  
 h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

### Tim Peneliti

No	Nama Peneliti	Bidang Keahlian	Fakultas Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Sukri, SIP., MA.	Kebijakan Publik	FISIP/Ilmu Politik	Universitas Hasanuddin

### 3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 1 (satu) tahun  
 b. Biaya yang diusulkan : Rp. 49.955.000,-  
 c. Biaya yang disetujui : Rp. 49.955.000,-

Surabaya, 9 November 2011

Ketua Peneliti,



Ucu Martanto, SIP., MA.  
NIP. 197903272009121003

Mengetahui,  
Dekan Fisip Unair

Drs. I Basis Susilo, M.A  
NIP. 195408081981031007



Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM)  
Universitas Airlangga

Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si.  
NIP. 195608051987011001

## Ringkasan Eksekutif

### Model Kebijakan Pendidikan Nir-Kekerasan di Kota Makassar<sup>1</sup>

oleh:

Ucu Martanto<sup>2</sup> dan Sukri<sup>3</sup>

#### I. Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Perkelahian antar mahasiswa dan demonstrasi mahasiswa yang disertai dengan kekerasan di Kota Makassar dari waktu ke waktu selalu terjadi. Sungguhpun dilihat dari kuantitas mengalami penurunan namun hampir dapat dipastikan frekuensi dalam setiap tahun selalu saja terjadi. Fenomena ini telah memunculkan stigma ataupun stereotyping bahwa mahasiswa di Kota Makassar selalu identik dengan kekerasan. Kondisi ini sangat merugikan bagi mahasiswa di Kota Makassar maupun institusi pendidikan di Kota Makassar.

Kajian-kajian tentang kekerasan mahasiswa di Kota Makassar cukup banyak dilakukan. Namun salah satu kekurangan yang diidapnya adalah masih kentalnya perspektif budaya yang cenderung menempatkan budaya Makassar (dan etnis makassar) lekat dengan praktek-praktek kekerasan. Akibat dari kuatnya perspektif ini maka preskripsi-preskripsi kebijakan pendidikan yang diberikan hanya berkutat untuk mencari interpretasi budaya dan menggali ikhtiar norma-norma dan nilai-nilai alternatif untuk menandingi/melawan arus besar wacana budaya kekerasan. Situasi ini menyebabkan formulasi kebijakan yang dihasilkan menjadi cenderung *counter-productive* atau tidak efektif dalam menghentikan lingkaran kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Bukan berarti kebijakan-kebijakan yang mengadopsi perspektif yang ada selama ini adalah salah, namun kebutuhan untuk menghadirkan perspektif-perspektif lain yang lebih beragam tentunya akan menghasilkan kebijakan yang lebih menyeluruh.

<sup>1</sup> Penelitian dibiayai melalui hibah Bersaing, tahun anggaran 2011, dengan anggaran Rp.49.955.000

<sup>2</sup> Dosen Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

<sup>3</sup> Dosen Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Hasanuddin.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian dengan tema serupa yang telah ada namun dengan perspektif atau cara pandang yang berbeda yang tentunya lebih lengkap dari penelitian yang pernah dibuat. Nilai penting dari penelitian ini adalah memahami kekerasan mahasiswa di Kota Makassar secara lebih mendalam dan memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di Kota Makassar untuk bersama-sama menghentikan kekerasan mahasiswa.

Secara umum penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan kebijakan pendidikan di Kota Makassar untuk menghentikan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Rumusan rekomendasi ini dicapai melalui tujuan khusus berikut ini:

- a. Memetakan hubungan antara pola-pola kekerasan mahasiswa dengan dalam sumber-sumber referensi yang menjustifikasi tindakan kekerasan.
- b. Menawarkan solusi-solusi yang dapat diupayakan oleh setiap stakeholder pendidikan di Kota Makassar untuk menghentikan kekerasan mahasiswa.

Hasil dari penelitian ini adalah masukan bagi perumus kebijakan pendidikan di Kota Makassar maupun di tingkat nasional tentang bagaimana memahami persoalan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan tawaran peta jalan (*road map*) untuk membuat kebijakan pendidikan serta model kebijakan pendidikan dalam rangka menghentikan lingkaran kekerasan mahasiswa atau meminimalisasi praktek kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.

Perlu juga ditegaskan bahwa keterbatasan penelitian ini adalah kapasitasnya dalam melaukan generalisasi karena hanya spesifik menjelaskan dan memahami kasus di Kota Makassar. Hal ini didasarkan pada asumsi kami terhadap hubungan yang sangat erat antara konteks dengan anatomi kekerasan. Setiap kasus kekerasan, anatominya sangat ditentukan oleh tempat (konteks) praktek kekerasan itu terjadi. Untuk itu, kami menyarankan perlu dilakukan penelitian-penelitian lain dalam membuat kebijakan nir kekerasan di wilayah lain.

## II. Inovasi Ipteks

Penelitian ini tidak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembaruan dan pengembangan teknologi akan tetapi sangat bertalian erat dengan pembaruan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian konflik-kekerasan mahasiswa. Kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini setidaknya berkaitan dengan dua hal. Pertama, penggunaan pendekatan multi-perspektif dalam merumuskan kebijakan untuk menghentikan kekerasan mahasiswa. Kedua, memformulasikan pendidikan perdamaian dalam model kebijakan pendidikan nir-kekerasan di Kota Makassar. Perspektif pendidikan perdamaian (*peace education*) dalam kebijakan pendidikan relatif baru di Indonesia untuk itu dengan menghadirkan perspektif ini dalam tawaran model kebijakan pendidikan di Kota Makassar, tentunya akan memberikan suntikan baru bagi pengembangan kajian konflik dan kekerasan di Indonesia.

Sehubungan bahwa kasus kekerasan mahasiswa tidak hanya eksklusif terjadi di Kota Makassar, maka kebutuhan untuk melakukan kajian serupa di daerah-daerah yang sering terjadi kekerasan relatif sangat diperlukan. Dengan menggunakan metode yang sama perluasan cakupan penelitian dapat dilakukan. Namun yang perlu diperhatikan adalah keragaman konteks sosial-budaya di setiap daerah menyebabkan kecenderungan perbedaan sentuhan model kebijakan pendidikan.

### III. Kontribusi Terhadap Pembangunan

Dari sudut pandang manapun tindakan kekerasan tidak dapat diterima terlebih jika aktor pelaku kekerasan tidak memiliki keabsahan dalam melakukan kekerasan. Salah satu problematika pembangunan di Indonesia adalah hadirnya kekerasan sebagai bagian dari proses pembangunan. Kekerasan dalam proses pembangunan tidak hanya hadir dalam wajah kekerasan fisik tetapi juga kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan struktural umumnya dilakukan oleh pemilik kekuasaan atau kewenangan dalam hal ini negara atau pemerintah. Umumnya bentuk dari kekerasan struktural adalah kebijakan yang membatasi warga negara dalam memperoleh atau mendapatkan hak-haknya.

Idealnya kebijakan pembangunan memberikan persamaan kepada seluruh warga negara untuk beraktivitas mengeluarkan segala potensi diri dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam kebijakan pembangunan tidak ada satupun warga negara yang tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan. Jika hal ini tidak diwujudkan maka potensi terjadinya perlawanan sosial (*social resistance*) dan pembangkangan sosial (*social disobedience*) sebagai bentuk dari upaya warga negara untuk mengejar keadilan akan sangat besar. Lebih jauh, gejala-gejala tersebut justru berakibat kontra-produktif bagi capaian-capaian kebijakan pembangunan itu sendiri. Kajian ini berkontribusi dalam porsi tertentu bagi upaya untuk memahami sekaligus mengantisipasi merebaknya perlawanan dan pembangkangan masyarakat.

#### IV. Manfaat Bagi Institusi

Sedari awal, desain penelitian ini melibatkan berbagai institusi dalam perumusan permasalahan, pelaksanaan penelitian, hingga perumusan rekomendasi. Kesadaran untuk melibatkan beragam institusi didasarkan kepada argumentasi bahwa persoalan kekerasan mahasiswa khususnya dan kebijakan pendidikan perguruan tinggi umumnya bukan eksklusif milik peneliti semata melainkan juga *stakeholder* pendidikan di Indonesia (Kota Makassar). Untuk itu kami secara intens bekerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi di Kota Makassar, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus, pemerintah Kota Makassar, dan Kepolisian.

Secara singkat kontribusi para pihak dalam penelitian akan dijelaskan sebagai berikut. Dirjen Dikti memberikan lanskap persoalan dan kebijakan yang telah dibuat. Lanskap persoalan dan kebijakan ini sangat berguna dalam membuat peta masalah kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Perguruan tinggi di Kota Makassar, seperti: Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UMN), Universitas 45 Makassar, Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Universitas Islam Muhammadiyah (Unismu), dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjadi narasumber, memberikan data, dan pemikiran-pemikiran mereka dalam menyelesaikan persoalan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan membantu

penelitian dalam menjadi narasumber, menyuplai data dan terlibat langsung sebagai asisten peneliti. Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini DPRD Kota Makassar, memberikan pandangan tentang hubungan antara kekerasan mahasiswa dan politik praktis Kota Makassar dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan kekerasan mahasiswa. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menyediakan data intelejen dan pandang-pandangannya tentang kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.

Anggota tim peneliti dalam penelitian ini merupakan kolaborasi antara peneliti dari Universitas Airlangga Surabaya dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Pelibatan peneliti dari Universitas Hasanuddin merupakan kekuatan terutama dalam memahami persoalan dan aksesibilitas kepada narasumber. Sementara, peneliti dari Universitas Airlangga memberikan kekuatan terhadap kejernihan dalam proses identifikasi dan rekomendasi permasalahan karena adanya keterjarakan antara peneliti dengan yang diteliti.

## V. Publikasi Ilmiah

Hasil penelitian ini sedianya akan dilaporkan kepada Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dalam bentuk *policy paper*. Selain itu, kami juga akan mempublikasi hasil laporan penelitian ini dalam bentuk tulisan jurnal dan mempresentasikan dalam kegiatan seminar nasional.

## ABSTRAK

Kekerasan mahasiswa merupakan salah satu potret buram pendidikan di Indonesia. Fenomena kekerasan mahasiswa merebak di berbagai daerah dengan kualitas dan frekuensi yang sangat beragam. Sebagai kota terbesar dan strategis, Makassar menjadi pusat kegiatan pendidikan paling utama di Indonesia bagian timur. Pemberitaan media massa seputar kekerasan mahasiswa yang melibatkan pelbagai perguruan tinggi di kota ini menyebabkan Makassar termasuk yang paling menonjol di Indonesia. Tentunya, kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan sehingga tidak dapat dibiarkan terus berlanjut.

Upaya untuk menghentikan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar telah dilakukan oleh institusi-institusi perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Namun demikian, kebijakan-kebijakan yang ada ternyata belum mampu secara maksimal menghentikan lingkaran kekerasan mahasiswa. Kegagalan ini setidaknya tersirat dari masing-masing tingginya frekuensi kejadian kekerasan di Kota Makassar.

Penelitian ini mencoba untuk menawarkan kebijakan alternatif dengan terlebih dahulu memahami dan menganalisa kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Dalam kajian ini kekerasan mahasiswa dimaknai dalam dua perspektif yaitu; a) analisa sosial-budaya dan ekonomi politik yang terangkum dalam perspektif akar penyebab kekerasan dan b) analisa pola dan metode kekerasan yang terkerangkai dalam perspektif kekerasan sebagai strategi. Berangkat dari dua perspektif ini, kami merumuskan model dan solusi kebijakan pendidikan nir-kekerasan di Kota Makassar.

Tiga isu kebijakan yang menjadi celah untuk memperkenalkan kebijakan pendidikan nir-kekerasan adalah modifikasi kurikulum, modifikasi organisasi kemahasiswaan, dan kebijakan eksternalitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Poin penting dalam modifikasi kurikulum adalah memasukan nilai-nilai inklusifitas dan perdamaian dalam konten mata kuliah dan perkuliahan. Modifikasi organisasi kemahasiswaan memasukan agenda memperkuat dan memperluas aktifitas organisasi formal kemahasiswaan. Kebijakan baru eksternalitas perguruan tinggi meliputi tanggung jawab sosial perguruan tinggi dan kerjasama perguruan tinggi dengan institusi pemerintah daerah.

## PRAKATA

Kekerasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah manusia. Penghentian kekerasan dalam kehidupan manusia merupakan tantangan sangat berat dalam mewujudkan masyarakat beradab. Demikian halnya dengan kekerasan mahasiswa di berbagai daerah Indonesia yang kian merebak merupakan agenda yang harus dilakukan bersama. Ide dan penyelenggaraan penelitian ini merupakan bentuk kegelisahan para peneliti di Departemen Politik, FISIP, Universitas Airlangga terhadap fenomena kekerasan mahasiswa di Indonesia, terutama di Kota Makassar.

Laporan penelitian yang ada dihadapan Anda merupakan salah satu dari empat penelitian yang memiliki tema besar tentang kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Tiga penelitian lainnya adalah “Konstruksi Sosial Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar”, “Analisa Kultural-Politik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar”, dan “Anatomi Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar”. Sebagai sebuah kesatuan, laporan penelitian ini akan lebih dipahami jika terlebih dahulu membaca tiga laporan penelitian lainnya.

Ucapan terima kasih pertama-pertama kami haturkan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang telah berkenan memfasilitasi penyelenggaraan penelitian ini melalui skema Hibah Bersaing. Selanjutnya kepada LPPM Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, dan Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Ketiga lembaga ini memberikan fasilitas dan kemudahan dalam penelitian kami. Selain itu, penghargaan tidak terhingga kepada para narasumber kami di pelbagai perguruan tinggi di Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan Pemerintah Kota Makassar. Terakhir, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan peneliti di Universitas Airlangga dan Universitas Hasanuddin.

## DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan	i
A LAPORAN HASIL PENELITIAN	
Ringkasan dan Summary	ii
Abstrak	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Bab 1    Pendahuluan	1
Bab 2    Tinjauan Pustaka	6
Bab 3    Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
Bab 4    Metode Penelitian	22
Bab 5    Hasil dan Pembahasan	25
Bab 6    Kesimpulan dan Saran	51
Daftar Pustaka	54
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Kekerasan	9
Tabel 2. Dimensi-Dimensi Kebijakan Dalam Setiap Fase Kebijakan	14
Tabel 3. Peta Masalah dan Alternatif Solusi Kebijakan	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dimensi-Dimensi Kebijakan	13
Gambar 2. Pembuatan Kebijakan Model Linier	17
Gambar 3. Jumlah Kekerasan Mahasiswa	26
Gambar 4. Pemicu Kekerasan	28
Gambar 5. Proses Kekerasan Mahasiswa	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan kasus kekerasan mahasiswa di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini tetapi masa yang akan datang. Kekerasan dan vandalisme yang melibatkan mahasiswa di berbagai tempat di Indonesia telah menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi karena rusaknya berbagai fasilitas umum maupun kampus. Lebih dari itu, dampak kekerasan yang lebih mengkhawatirkan adalah yang bersifat *intangible*. Kekerasan yang digunakan sebagai metode/alat untuk mendramatisasikan tuntutan-tuntutan (*instrumental*) maupun penegasan identitas (*constitutive*) telah terinternalisasi dalam perilaku keseharian mahasiswa. Ini semakin berbahaya mengingat mahasiswa hanyalah satu dari beragam identitas (*multi-identity*) yang tersematkan pada setiap subjek. Setiap subjek memiliki identitas sebagai mahasiswa, pemuda, pemeluk agama tertentu, anggota etnis, anggota organisasi, anggota keluarga, dst. Mahasiswa diproyeksikan untuk menjadi kandidat-kandidat pemimpin masa depan. Jika kekerasan telah terinternalisasi maka dapat berimbas pada karakter pemimpin masa depan bangsa Indonesia.

Masalah kekerasan mahasiswa semakin pelik untuk dicarikan jalan keluar semenjak belum terdapat kajian yang cukup komprehensif memetakan kekerasan mahasiswa di daerah yang spesifik. Kajian dan data base kekerasan mahasiswa yang tersedia di Indonesia sangat terbatas. Data base umum tentang kekerasan kolektif pernah dilakukan oleh Varshney, Panggabean, dan Tadjoeuddin (2004) dengan judul 'Pola-pola Kekerasan Kolektif di Indonesia (1990-2003)'. Data mereka hanya menunjukkan bahwa hampir 40% kekerasan komunal yang terjadi di Indonesia dipicu oleh perkelahian pemuda. Deskripsi ini masih sangat terbatas dan samar untuk mengetahui pola-pola kekerasan mahasiswa di daerah tertentu. Oleh karena itu data

kekerasan kelompok yang spesifik mahasiswa dan daerah tertentu sangat diperlukan untuk memberikan deskripsi anatomi kekerasan mahasiswa di setiap daerah dan bagaimana cara penanganannya.

Kekerasan mahasiswa bukanlah kasus eksklusif di Kota Makassar melainkan terjadi hampir diberbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, intensitas kekerasan mahasiswa yang terjadi di Kota Makassar tergolong tinggi dibanding kota-kota lain di Indonesia. Kekerasan mahasiswa di Makassar terjadi saat perkelahiran antar-fakultas dan antar-universitas, orientasi mahasiswa baru, demonstrasi dan protes mahasiswa, dst.

Berangkat dari pelbagai studi yang mengangkat pertanyaan penelitian tentang mengapa kekerasan mahasiswa sering terjadi di Kota Makassar, setidaknya ada dua pendekatan yang sangat dominan, yaitu ekonomi-politik dan sosial-budaya. Kedua pendekatan ini cukup berhasil mengelaborasi akar-akar penyebab (*root causes*) kekerasan mahasiswa. Dari sudut pandang pendekatan ekonomi-politik, kekerasan mahasiswa di Kota Makassar didorong oleh adanya persaingan politik antara elit-elit dalam menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan daerah (seperti: pemerintah kota, pemerintah provinsi, maupun lembaga perwakilan daerah), kampus (pimpinan fakultas dan universitas), dan politik nasional. Sementara, sumbangan dari pendekatan sosial-budaya lebih menitikberatkan pada kontruksi budaya lokal termanifestasi melalui nilai, norma, praktek-praktek sosial-budaya yang "melegitimasi" tindakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Pewacanaan nilai, norma, dan praktek sosial-budaya kekerasan demikian hegemonik sehingga wacana lain (baca: nilai, norma, dan praktek nir-kekerasan) menjadi meredup sehingga kurang mendapat tempat bagi referensi tindakan mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan.

Apakah kedua pendekatan ini cukup untuk menjelaskan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar dan memberikan solusi kebijakan pendidikan yang tepat dalam menghentikan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar? Dalam khasanah teoritik, kebijakan sebagai penyelesaian persoalan (*problem solving*) sangat ditentukan oleh seberapa komprehensif pembuat kebijakan dalam merumuskan/menentukan permasalahan dan memahami masalah. Jika demikian, semakin banyak perspektif yang

tersedia dalam memahami kekerasan mahasiswa di Kota Makassar, maka akan semakin efektif kebijakan tersebut menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menggunakan pendekatan-pendekatan lain dalam melihat persoalan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.

Secara singkat, pendekatan strategi berangkat dari asumsi yang sangat berbeda dengan pendekatan ekonomi-politik dan sosial-budaya. Pendekatan ini melihat bahwa kekerasan bukan hanya sebagai produk atau hasil dari persoalan-persoalan ekonomi-politik dan sosial-budaya melainkan cara atau strategi dalam merespon persoalan-persoalan tersebut. Perbedaan lainnya adalah asumsi kedua pendekatan terdahulu yang menyatakan bahwa kekerasan merupakan tindakan irrasional. Justru sebaliknya, bagi pendekatan ini kekerasan adalah tindakan rasional. Kekerasan adalah manifestasi dari penyelarasan “bahasa” dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya kepada negara maupun penguasa. Sederhananya, artikulasi kepentingan mahasiswa dapat didengar dan diterima oleh negara dan penguasa jika menggunakan bahasa kekerasan, karena bahasa kekerasan (wacana dan praktek kekerasan) dipertontonkan dan dipergunakan sehari-hari oleh negara dan penguasa.

Bahasa kekerasan cenderung bersifat universal ketika menjadi upaya terakhir (*last resort*) dalam ketiadaan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan persoalan. Pada satu sisi, relasi kekuasaan hegemonik dan tidak berimbang menjalar dalam struktur sosial-budaya, politik, dan ekonomi dan di sisi lain semakin mudarnya wacana-wacana perdamaian adalah persoalan akut yang hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Akibatnya, praktek-praktek kekerasan berhasil melampaui strata-strata sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Institusi-institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat bagi individu untuk mempelajari dan mempraktekan budaya keadaban (*civility*) dan perdamaian (*peace*) dalam banyak kasus di Indonesia justru menjadi arena produksi kekerasan. Kegiatan-kegiatan orientasi mahasiswa baru, aktivitas kemahasiswaan, bahkan kegiatan belajar-mengajar merupakan contoh-contoh kasus yang sarat dengan praktek-praktek kekerasan.

Dengan mencermati kecenderungan ini, maka wacana reorientasi kebijakan pendidikan di Indonesia mendesak untuk digulirkan. Pondasi dari kebijakan pendidikan nir-kekerasan (pendidikan tanpa kekerasan) tidak hanya bersandar pada nilai-nilai perdamaian tetapi juga mencakup manifestasi dari praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan tanpa kekerasan. Pada titik ini konsep tentang pendidikan perdamaian (*peace education*) menjadi sangat relevan untuk ditempatkan sebagai rujukan ideal dari model-model kebijakan pendidikan nir-kekerasan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh institusi-institusi pendidikan maupun pemerintah.

Pendidikan perdamaian (*peace education*) adalah serangkaian kegiatan ‘pelibatan pembelajaran’ yang memenuhi hasrat manusia untuk mendapatkan situasi damai; menawarkan alternatif-alternatif mengelola konflik tanpa-kekerasan; dan meningkatkan keterampilan-keterampilan untuk menganalisa secara kritis kondisi struktural yang menghasilkan dan mengabsahkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan (Harris and Synott, 2002). Sejalan dengan ini, James Page (2008: 189) menyarankan bahwa pendidikan perdamaian seharusnya diajarkan untuk meningkatkan komitmen terhadap perdamaian sebagai sebuah arahan yang tetap dan mengembangkan kepercayaan individu sebagai agen perdamaian; memberitahukan kepada siswa tentang nilai-nilai perdamaian dan struktur sosial yang adil dan berusaha untuk mempertahankan atau mengembangkan struktur-struktur sosial tersebut; menyemangati siswa untuk mencintai dunia dan membayangkan masa depan yang damai; dan mendorong siswa untuk peduli terhadap sesama.

Sejalan dengan paparan di atas, penelitian ini mencoba membaca kekerasan mahasiswa di Kota Makassar dari pendekatan kekerasan sebagai strategi. Penambahan pendekatan ini dengan dua arus besar (*mainstream*) pendekatan ekonomi-politik dan sosial-budaya akan dapat memperluas cakrawala dalam memahami kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Setelah itu, rumusan analisa kekerasan mahasiswa di Kota Makassar melalui pendekatan-pendekatan tersebut akan dielaborasi untuk memformulasi model kebijakan pendidikan nir-kekerasan yang berbasis pada pendidikan perdamaian. Keluaran dari hasil penelitian ini adalah tawaran alternatif

kebijakan pendidikan sebagai upaya penyelesaian masalah kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dielaborasi dua isu yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian, yaitu kekerasan dan kebijakan pendidikan perdamaian. Pembahasan tentang kekerasan akan mencakup bagaimana mendefinisikan dan mengkatagorisasikan kekerasan mahasiswa dalam khasanah teori tentang kekerasan. Sementara, pada bagian kedua akan menjelaskan kerangka konsep kebijakan pendidikan perdamaian dalam upaya menghentikan lingkaran praktek kekerasan pada institusi pendidikan.

#### 1. Kekerasan

Kesulitan awal yang akan dihadapi dalam meneliti kekerasan adalah bagaimana mendefinisikan kekerasan dan manakah tindakan masuk dalam katagori kekerasan. Kekerasan dapat dimaknai secara berbeda-beda antara korban (*victim*) dan pelaku (*perpetrator*). Belum lagi ketika definisi kekerasan diperhadapkan dengan tindakan-tindakan aparaturnegara yang memiliki legitimasi atas penggunaan kekerasan. Pada masyarakat multikultur, kerumitan definisi kekerasan akan semakin bertambah tatkala kekerasan dimaknai secara berbeda-beda dari kacamata nilai dan norma adat tertentu. Misalnya, pemerhati (*audience*) menemukan dalam masyarakat tindakan seperti memukul, mencambuk, atau bahkan membunuh dalam rangka menegakan nilai-nilai adat tertentu dapat dibenarkan. Jika demikian, mendefinisikan kekerasan menjadi penting untuk memberikan batasan-batasan apakah definsi kekerasan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Eller (2006: 5-13) menawarkan enam indikator yang dapat digunakan untuk membuat batasan-batasan (mendefinisikan) kekerasan, yaitu kekuatan, maksud, kemanusiaan, rasionalitas/irrasionalitas, legitimasi, dan perspektif.

*Kekuatan.* Definisi sempit kekerasan diasosiasikan dengan penggunaan kekuatan fisik (*physical force*). Ini dapat terjadi melalui penggunaan kekuatan fisik (aktif) seperti

yang terjadi pada kejahatan-kejahatan jalanan maupun kekuatan ancaman fisik (secara pasif) seperti kejahatan-kejahatan kerah putih. Definisi kekerasan menjadi lebih luas jika memasukan penggunaan kekuatan untuk membatasi pilihan sehingga menyebabkan seseorang berada pada posisi tidak mengenakan atau biasa disebut sebagai kekerasan struktural (*structural violence*). Ini sejalan dengan Johan Galtung yang mengatagorikan kekerasan menjadi dua, yaitu kekerasan personal (*personal violence*) yang didalamnya terdapat kekerasan fisik dan psikologis dengan kekerasan struktural.

**Maksud.** Dalam sistem hukum dan kehidupan sehari-hari, seseorang dianggap melakukan kekerasan jika dia bermaksud melakukannya. Persoalannya kemudian adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang justru diakibatkan oleh situasi di luar terkontrolnya atau dipaksa oleh orang lain untuk melakukannya. Seperti seorang wanita memukul pria yang tengah mencoba memperkosa dirinya atau seorang dokter bedah yang mengamputasi kaki pasiennya agar pembusukan tidak menjalar keseluruhan tubuh. Situasi ini menjadi wilayah abu-abu untuk mendefinisikan apakah tindakan tersebut termasuk dalam katagori kekerasan atau bukan.

**Kemanusiaan.** Sebuah tindakan hanya mungkin dikatakan kekerasan apabila pelaku dan korbannya adalah sama-sama manusia. Definisi ini membatasi tindakan-tindakan yang salah satu pelaku atau korbannya bukan manusia, seperti memukul kucing yang telah mencuri ikan di meja makan atau seorang anak kecil sedang berkumur antiseptik untuk membunuh kuman-kuman yang ada dimulutnya. Seperti dikatakan oleh Keane (2004:36), ... *violence is always 'embodied'. The embodied quality of violence helps us to understand why the blocking off of a highway by chanting demonstrators who lie down on the pavement is not an act of violence.* Jika kekerasan selalu berhubungan dengan (tubuh) manusia sebagai sasaran untuk disakiti, dilukai, atau bahkan dibunuh, maka bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berhubungan dengannya dikatagorikan bukan kekerasan, seperti pengerusakan (*vandalist*).

**Rasionalitas/irasionalitas.** Banyak yang memahami kalau kekerasan adalah tindakan irrasional atau tindakan di bawah pengaruh kekuatan jahat/setan yang hanya

dilakukan oleh “orang jahat”. Pemahaman ini menciptakan dikotomi yang absurd antara orang baik dan orang jahat. Padahal kondisi-kondisi tertentu dapat saja mendorong seorang baik berubah menjadi orang jahat. Setidaknya hal ini terungkap dalam studi Arendt (1969) tentang kekerasan Perang Dunia II dan Pasca Perang Dunia II.

*Legitimasi.* Persoalan dari keabsahan kekerasan berakar pada “relativitas” kekerasan. Relativitas kekerasan bukan menunjuk pada kejadian kekerasan seseorang terhadap orang lain melainkan pada konteks sosial spesifik seperti apa tindakan itu terjadi, seperti seorang petinju profesional memukul lawannya pada saat pertandingan adalah kekerasan yang absah (*legitimate violence*). Kejadian pada konteks sosial spesifik juga mempertimbangkan keberadaan ruang dan waktu. Saat ini memasung seseorang karena alasan kegilaan adalah tindakan kekerasan, tetapi penilaian ini akan berbeda jika kita hidup dua abad lalu atau “kawin lari” adalah tindakan kita dianggap salah tetapi oleh masyarakat lain dianggap normal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku menyimpang bersifat relatif ketika didudukan dalam konteks sosial yang spesifik. Ini sejalan dengan Schmidt and Schroder (2001:18-19) yang mengatakan “violence is performed as well as imagined by reflexive, socially positioned human beings under specific historical conditions for concrete reasons”.

Lebih jauh lagi dalam konteks kekerasan politik (*political violence*) hubungan kekuasaan (*power*) dengan kekerasan (*violence*) selalu berpunggungan. Kekerasan pada dasarnya adalah tidak absah (*illegitimate*), kekerasan selalu menjadi alat yang digunakan oleh para penguasa pada saat mereka kehilangan atau tidak memiliki kekuasaan yang absah (Arendt, 1969).

*Perspektif.* Dalam setiap tindakan kekerasan paling tidak terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban dan keduanya memiliki persepsi yang berbeda terhadap kejadian kekerasan. Dalam pendekatan kekerasan konvensional, sebagai penonton (*audience*) akan segera berempati dengan kondisi yang dialami oleh korban dan di sisi lain menganggap tindakan pelaku adalah tidak benar sehingga patut dipersalahkan tanpa terlebih dahulu memberikan penilaian memadai terhadap

argumentasi-argumentasi pelaku. Episode kekerasan layaknya sebuah “pementasan” yang melibatkan aktor dan perannya. Untuk memahami keseluruhan pementasan maka perlu mengetahui masing-masing aktor dan perannya. Demikian dengan episode kekerasan, untuk memahaminya maka baik elaborasi dari perspektif korban, pelaku, dan penonton dengan segala motivasi, nilai, dan pemahaman mereka, mau tidak mau harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh (*thick description*) atas episode kekerasan.

Tabel 1. Definisi Kekerasan

	Kekuatan	Maksud	Kemanusiaan	Legitimasi	Rasionalitas	Perspektif
Sempit	Kekuatan fisik terhadap individu	Dilakukan dengan sengaja	Manusia sebagai pelaku dan korban	Berdasarkan fakta kejadian	Tindakan irrasional.	Bias korban
Luas	Kekuatan fisik terhadap individu dan kekerasan struktural	Dilakukan dengan sengaja dan situasi mendesak.	‘Korban’ tidak terbatas manusia	Berdasarkan fakta kejadian dan nilai dan norma sosial.	Tindakan irrasional dan terdorong oleh situasi.	Perspektif korban, pelaku, dan penonton

Sumber: diolah dari Eller (2006)

Dalam penelitian ini kekerasan didefinisikan secara luas namun dengan pengecualian pada indikator *personhood* (lihat tabel 1). Dengan demikian kekerasan adalah penggunaan kekuatan atas fisik dan struktur yang dilakukan secara sengaja ataupun dalam situasi mendesak oleh manusia. Kekerasan adalah tindakan yang didorong oleh irrasionalitas dan desakan situasi serta memiliki keabsahan pada saat kejadian berlangsung maupun berdasarkan nilai dan norma tradisi. Dengan demikian, jika seorang mengalami kekerasan maka ia akan mengalami gangguan terhadap tubuhnya yang dapat berakibat pada rasa sakit secara fisik maupun psikologis.

Selain batasan definisi kekerasan yang telah dibahas di atas, penelitian ini juga membatasi pada bentuk kekerasan kolektif atau kelompok. Kekerasan kolektif atau kelompok adalah kekerasan yang terjadi antar kelompok mahasiswa, antara kelompok mahasiswa dengan individu, antara individu di dalam kelompok mahasiswa, dan antara negara dengan kelompok mahasiswa. Penelitian ini tidak memasukan kekerasan yang

hanya melibatkan dua mahasiswa kecuali jika kekerasan ini menjadi memicu terjadi kekerasan kelompok mahasiswa.

### *Instrumental dan Konstitutif*

Studi tindakan kekerasan telah menghasilkan banyak teori yang bersumber dari pendekatan biologis-psikologis dan sosial-antropologis. Pendekatan-pendekatan tersebut mencoba memahami “akar penyebab” atau faktor-faktor yang berkontribusi pada kekerasan yang bersumber dalam diri manusia (*internal*), seperti yang menjadi pokok besar pendekatan biologis-psikologis, maupun yang bersumber dari luar diri manusia (*external*) seperti banyak digunakan oleh pendekatan sosial-antropologis. Selain itu, pendekatan-pendekatan ini juga memetakan faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam memformulasi dan menjustifikasi tindakan kekerasan, seperti integrasi ke dalam kelompok, identitas, ideologi, dan kepentingan (Eller, 2006).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosial-antropologis untuk membaca keberadaan mahasiswa dalam konteks sosial-politik di Kota Makassar. Pilihan ini bukan berarti bertendensi untuk meminggirkan kontribusi pendekatan biologis-psikologis dalam memahami kekerasan mahasiswa di Kota Makassar, namun lebih pada upaya untuk membedakan kasus Kota Makassar dibanding kota-kota lain di Indonesia. Pendekatan sosial-antropologis terhadap kekerasan dapat dipahami melalui konsep *dislokasi* (lihat gambar 1). Dislokasi memandang penting kondisi kontegensi dimana setiap objek sosial dan hubungan sosial selalu dalam status menyesuaikan atau menciptakan kondisi yang dianggap sesuai.

*no matter how smoothly something functions, or how unproblematised some practise appear the theory claim that it is constitutively 'out of joint': any social object or relation are never quit able to rest peacefully in its 'proper place' – in fact there are no proper places. The social is not a jigsaw puzzle (Laclau 1991).*

Proses kontegensi terhadap sebuah kondisi termanifestasi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kekerasan. Faktor-faktor yang memformulasi dan menjustifikasi

kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori, yaitu: faktor-faktor yang bersifat instrumental dan konstitutif. Instrumental berarti menjadikan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan/kepentingan. Hal ini menjadi mungkin dilakukan karena tidak adanya saluran-saluran yang dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mahasiswa, walaupun saluran-saluran telah tersedia berarti ada persoalan yang mengakibatkan tidak bekerja maksimal. Konstitutif berarti menempatkan kekerasan sebagai tindakan penegasan identitas mahasiswa. Mereka tidak mempersoalkan ada atau tidaknya saluran untuk menunjukkan eksistensi identitasnya, namun hanya dengan kekerasan identitas mereka menjadi ada. Ini dapat berujud pada, salah satunya, ideologi gerakan.

## 2. Model Kebijakan

Istilah 'kebijakan publik' bisa dipakai untuk merujuk hal yang berbeda-beda. Kadang-kadang, istilah ini dipakai untuk merujuk bidang-bidang kegiatan yang ditangani oleh pemerintah; seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertambangan. Dalam penyebutan ini, biasanya tersirat adanya keinginan untuk mencapai suatu hal atau kondisi. Ada kesengajaan dalam mengambil tindakan-tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Hanya saja, ada tujuan-tujuan yang abstrak dan luas cakupannya (misalnya meningkatkan kesejahteraan rakyat), dan ada pula tujuan-tujuan yang spesifik dan sempit cakupannya (misalnya meningkatkan retribusi pasar).

Adanya kesengajaan dalam mencapai tujuan tersebut di atas di tandai dengan adanya satu atau serangkaian pembuatan keputusan oleh penyelenggara kekuasaan negara, baik di tingkat nasional maupun lokal. Sungguhpun demikian, cakupan konsep 'kebijakan' jauh lebih luas dari pada konsep 'pengambilan keputusan'. Pengambilan keputusan memang merupakan titik strategis dalam pengambilan kebijakan, namun tidak bisa direduksi semata-mata sebagai persoalan pembuatan keputusan. Perumusan kebijakan publik harus didasari oleh runtutan penalaran, kalau bukan kerangka teori, tentang bagaimana tujuan-tujuan bisa dicapai. Keputusan yang ditetapkan berisikan disain tentang bagaimana tujuan bisa dicapai. Ini berarti dalam kebijakan publik

tersirat adanya rencana pengambilan tindakan, kalau bukan rencana kerja. Jelasnya, rumusan kebijakan juga berisi rumusan tentang bagaimana kebijakan tersebut dijabarkan dan dilaksanakan.

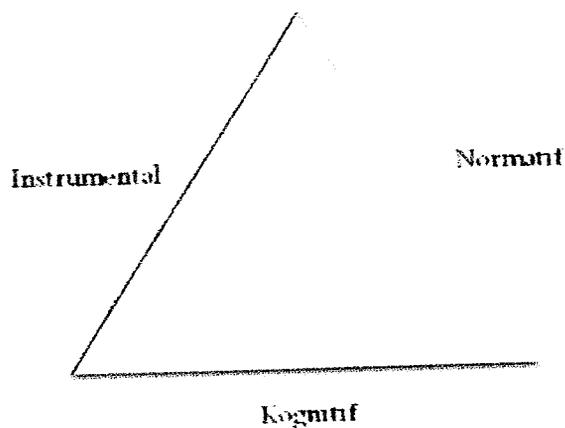
Sifat dari keputusan kebijakan tidak harus bersifat memaksa atau regulatif. Regulasi hanyalah salah satu, dari sekian tipe kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah. Sejumlah persoalan lebih mudah di atasi justru dengan menghindari langkah-langkah kebijakan yang regulatif. Kebijakan untuk meningkatkan kecintaan terhadap kampung halaman atau memperbaiki kualitas keberagamaan, misalnya, lebih baik dan lebih mudah dijangkai dengan memberikan sejumlah fasilitas: misalnya fasilitas olah raga. Pelaksanaan kebijakan tidak harus mengandalkan tangan daya paksa negara. Sebaliknya, dalam rangka pelembagaan demokrasi, hak khusus negara untuk menggunakan kekuatan paksa, harus dihemat seketat mungkin.

Kecenderungan umum para pengambil dan pembuat kebijakan adalah melakukan penyederhanaan kompleksitas persoalan dengan cara membuat tahapan-tahapan kebijakan (proses kebijakan). Penyederhanaan kompleksitas kebijakan menjadi serangkaian proses dan/atau prosedur memang memudahkan pengambil kebijakan dalam merancang dan pengelolaan kebijakan. Hanya saja perlu disadari bahwa penyederhanaan memuat jebakan yang memiliki dampak pada kualitas kebijakan yang hendak dibuat. Penyederhanaan pembuatan kebijakan menjadi serangkaian prosedur-prosedur secara tidak langsung mendudukkan persoalan kebijakan dari sudut pandang pengambil kebijakan. Pembingkaiian persoalan kebijakan memunculkan bias pembuat kebijakan dan pada saat yang bersamaan mensegregasi dimensi-dimensi lain dari persoalan kebijakan. Dengan kata lain, kemudahan yang dinikmati pengambil kebijakan harus dibayar mahal, yakni memudahkan kita terlena untuk tidak serius memikirkan dimensi-dimensi lain.

Tiga dimensi kebijakan yaitu kognitif, instrumental dan normatif, memiliki kegunaan untuk menetralsir bias sudut pandang perumus kebijakan (Santoso, 2004). Ketiganya perlu dicamkan dalam setiap tahap penyelenggaraan kebijakan publik. Artinya, dalam fase formulasi kebijakan, ke tiga dimensi tersebut perlu dicermati,

begitu juga pada tahap implementasi maupun evaluasi. Dengan mengedepankan niscaya ketiga dimensi tersebut, kelemahan yang berakar dari penyederhanaan kebijakan publik sebagai alur proses, bisa dikurangi. Keterkaitan ini diperagakan dalam Gambar 1.

Gambar 1 Dimensi-Dimensi Kebijakan



Perlu dicatat bahwa ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Andaikan kebijakan itu boleh dibayangkan sebagai sebuah segi tiga, maka ketiganya adalah sisi dari masing-masing bangun bersegi tiga tersebut. Masing-masing dimensi tersebut sebenarnya adalah hasil penglihatan terhadap fenomena kebijakan dari arah yang berbeda-beda. Perbedaan dimensi tersebut terjadi karena perbedaan sudut pandang. Sungguhpun demikian, ketiga dimensi tersebut bersifat saling menunjang. Lebih dari itu, untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan bisa tercapai, ketiga dimensi tersebut harus memiliki konsistensi dalam penjabarannya. Nuansa dari ke-tiga dimensi kebijakan tersebut di atas harus teridentifikasi manifestasinya dalam setiap fase formulasi kebijakan.

Dimensi kognitif dalam perumusan kebijakan mengandaikan bahwa pilihan-pilihan kebijakan didasarkan pada asumsi-asumsi dan analisa-analisa yang menyeluruh terhadap persoalan kebijakan. Dengan demikian, memahami persoalan dari segala arah

perspektif merupakan usaha yang harus dilakukan oleh perumus kebijakan. Bahwa kemudian perumus kebijakan mengambil posisi atau mendekatinya melalui satu kerangka pemikiran atau pendekatan tertentu dalam merumuskan kebijakan adalah hal yang lumrah dan dapat dipahami. Dimensi instrumental jelas terlihat dari seberapa besar dukungan kondisi eksternal terhadap rumusan kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan dapat terimplementasi dengan maksimal ketika tidak didukung oleh lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal dapat berupa kebijakan-kebijakan lain, infrastruktur kebijakan, situasi politik dan ekonomi, serta nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan itu, perumus kebijakan harus peka dan cerdas dalam merencanakan detail operasional dan hubungan-hubungannya dengan menilai dan menakar visibilitas dan viabilitas kebijakan. Dimensi instrumental bisa difahami sebagai pemenuhan persyaratan-persyaratan dan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang telah diputuskan bisa bergulir dan mencapai hasil yang diinginkan. Dimensi normatif merupakan dimensi yang tidak bisa diremehkan perannya karena kebijakan hanya bisa berfungsi dalam menghantarkan tercapainya tujuan kebijakan kalau norma-norma yang berlaku bisa ditegakkan. Dimensi normatif terlihat dari keharusan kita untuk merujuk pada norma-norma yang berlaku, khususnya norma penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis.

Pengkajian kebijakan strategis, mau tidak mau, harus mengacu pada ke tiga elemen dasar kebijakan publik. Untuk memberikan ilustrasi tentang keterkaitan antara kedua hal tersebut, kita bisa mencermati isi tabel berikut:

Tabel 2. Dimensi-Dimensi Kebijakan Dalam Setiap Fase Kebijakan

No	Fase Kebijakan	Contoh Manifestasi Dimensi Kebijakan
1	Penetapan agenda	<p><i>Dimensi kognitif:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya kesamaan persepsi tentang akar dan hakekat persoalan</li> <li>• Ketajaman visi pengembangan.</li> </ul> <p><i>Dimensi instrumental:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teridentifikasi cara-cara yang efektif untuk menggalang dukungan dalam merespon masalah-masalah publik.</li> <li>• Identifikasi kepentingan-kepentingan kelompok yang mendesakkan issue-issue tertentu untuk diagendakan</li> </ul>

No	Fase Kebijakan	Contoh Manifestasi Dimensi Kebijakan
		<p><i>Dimensi normatif:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur-prosedur politik berfungsi.</li> <li>• Adanya komitmen untuk merepon permasalahan, baik dari fihak negara ataupun dari fihak masyarakat.</li> </ul>
2	Perumusan dan legitimasi	<p><i>Dimensi kognitif:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difahami signifikansinya kebijakan, baik dari segi luasnya orang yang terkena implikasinya, dan kedalaman implikasi itu sendiri.</li> <li>• Kebijakan dirumuskan atas dasar suatu kerangka berfikir yang komprehensif dan bisa dijabarkan rencana pelaksanaannya secara sistematis.</li> </ul> <p><i>Dimensi instrumental:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirumuskan pula instrumen-instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan</li> <li>• Tersedia sumberdaya untuk dimobilisasi dalam implementasi kebijakan.</li> </ul> <p><i>Dimensi normatif:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum dihormati oleh masyarakat</li> <li>• Otoritas negara masih dipatuhi</li> </ul>
3	Implementasi	<p><i>Dimensi kognitif:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggara kebijakan faham tentang misi kebijakan.</li> <li>• Kegiatan-kegiatan operasional senantiasa dikaitkan dengan disain kebijakan.</li> </ul> <p><i>Dimensi instrumental:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen-instrumen kebijakan bisa difungsionalkan</li> <li>• Tercukupinya sumberdaya penopang.</li> <li>• Fleksibilitas dalam memodifikasi instrumen kebijakan.</li> </ul> <p><i>Dimensi normatif:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat berperilaku secara rasional.</li> <li>• Institusi-institusi di dalam masyarakat berfungsi dengan baik.</li> </ul>
4	Evaluasi	<p><i>Dimensi kognitif:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua tindakan kebijakan yang telah diambil bisa direkonstruksi (meruntut dari 'belakang' [implementasi] ke depan [disain])</li> <li>• Perubahan-perubahan yang terjadi bisa dikaitkan dengan tindakan kebijakan.</li> </ul> <p><i>Dimensi instrumental:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan kebijakan tetap bisa dijadikan acuan.</li> </ul> <p><i>Dimensi normatif:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambil kebijakan bersedia mengaku salah, kalau ada kesalahan, dan kemudian memperbaiki diri.</li> </ul>

Sumber: Santoso (2004)

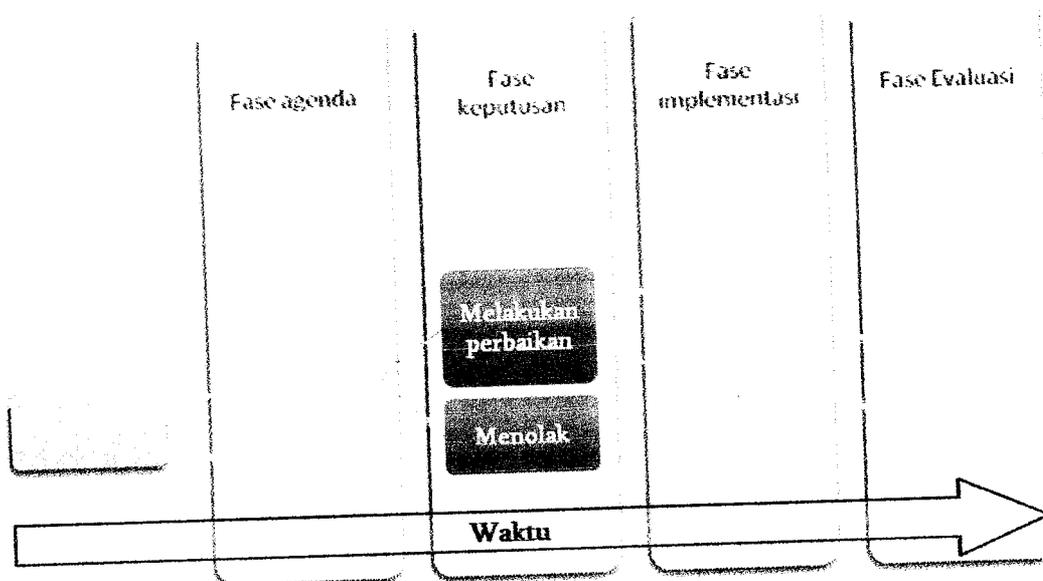
Pencermatan terhadap dimensi-dimensi kebijakan ini sangat diperlukan ketika kita mengidentifikasi sebuah strategi kebijakan. Sekali lagi, inkonsistensi antara ketiga

dimensi tersebut bisa mengancam efektifitas penyelenggaraan kebijakan, atau bahkan menyebabkan kegagalan kebijakan. Oleh karena itu, dalam setiap kemungkinan untuk mengoreksi proses kebijakan, ke-tiga dimensi kebijakan tersebut di atas harus di analisis.

Pembuatan kebijakan model linier adalah model mainstraem dan sangat sering dipraktikkan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Model ini mengidentikan pembuatan kebijakan sebagai proses penyelesaian masalah yang rasional, berimbang, objektif dan analitis. Dalam model ini pembuatan kebijakan dilakukan dalam serangkaian fase-fase, dimulai dari identifikasi masalah atau isu dan berakhir dengan sekumpulan aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah kebijakan. Fase-fase pembuatan kebijakan dalam model ini mencakup: a) merekognisi dan mendefinisikan lingkungan dari isu atau masalah yang hendak diselesaikan; b) mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kegiatan atau aktivitas untuk menghadapi isu atau masalah yang hendak diselesaikan; c) menimbang-timbang keunggulan dan kelemahan dari setiap alternatif aktivitas atau kegiatan tersebut; d) memilih pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah; e) mengimplemetasikan kebijakan; dan f) melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Proses di atas dapat terlihat dalam gambar.

Model ini mengasumsikan bahwa pendekatan pembuatan kebijakan adalah isu yang rasional, melewati setiap fase atau tahapan proses yang logis, dan mempertimbangkan secara hati-hati segala informasi yang relevan. Jika kebijakan-kebijakan yang lahir dari model ini tidak mampu memenuhi tujuannya, maka kesalahan bukan pada kebijakannya melainkan data kegagalan managemen dan politik dalam mengimplementasikan kebijakan (Juma and Clarke, 1995). Menurut penganut model ini, kegagalan-kegagalan kebijakan tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya *political will*, rendahnya kemampuan managemen, dan sumberdaya kebijakan.

## Gambar 2. Pembuatan Kebijakan Model Linier



Sumber: Grindle dan Thomas (1990)

Dalam tulisannya Sutton (1999) menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan harus dipahami sebagai proses politik seperti halnya proses analitis dan penyelesaian masalah. Dengan menjadikannya sebagai proses politik, maka kepekaan dan aksentuasi terhadap lingkungan dan kepentingan-kepentingan lain menjadi terjembatani. Pemahaman ini berbeda dengan cara pandang proses pembuatan kebijakan adalah proses rasional dan linier. Oleh karena itu, para pembuat perlu berpikir *out of box* untuk menghasilkan kebijakan yang efektif. Inovasi-inovasi dalam pembuatan kebijakan menjadi kata kunci. Lebih lanjut lagi, menurut Sutton (1999) menerangkan bahwa inovasi kebijakan dapat terjadi jika:

- Ada sebuah penelitian menyeluruh yang menjelaskan masalah dan mengklarifikasi aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Ada hubungan yang baik diantara dan didalam agensi-agensi kebijakan sehingga pembelajaran dari pengalaman praktis dapat dibagi dan dijadikan rujukan.

- Pengembangan masalah dianalisa secara ilmiah, teknis, menghasilkan data yang dapat dibaca sehingga dapat menawarkan sesuatu yang konkret untuk dikerjakan.
- Seseorang berwenangan memiliki kepentingan terhadap isu tertentu dan sehingga individu-individu yang ada disekitarnya terpengaruh untuk mengerjakannya dan mengembangkan kebijakan pada wilayah tersebut.
- Kondisi-kondisi yang ada menemukan momentum yang tepat sehingga sebuah agenda dapat didesakan kepada pemegang kekuasaan untuk mendukung agenda tersebut.
- Waktu untuk mempublikasi hasil penelitian dilakukan ketika pembuatan kebijakan tertarik terhadap masalah yang diteliti.
- Situasi yang berkembang ditunjukkan dalam skenario atau narasi yang diterima masyarakat sebagai sebuah krisis, sehingga membutuhkan aksi cepat dan dramatis untuk menghindari masalah yang lebih besar atau bencana.
- Ada koneksi yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan seperti lembaga donor, komunitas peneliti, pemerintah melalui pertukaran ide, gagasan, dan pemikiran dalam menjernihkan kemungkinan-kemungkinan arah kebijakan.
- Ada komunitas epistemik dominan, khususnya kelompok berpengaruh yang memiliki hubungan dekat dengan pembuat kebijakan, dan mendesakan isu menjadi agenda dalam pembuatan kebijakan.
- Ada konsensus bersama di dalam organisasi atau jejaring yang lebih luas bahwa perubahan diperlukan, arah kebijakan baru dibutuhkan, dan strategi-strategi lama tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Diskursus dominan atau cara berpikir baru menjadi lebih mapan sehingga prioritas-prioritas kebijakan tertentu menjadi lebih jelas.
- Ada *code of conduct* atau *best practice* terhadap isu tertentu, menjadikan pedoman dalam bertindak.

- Organisasi dan individu didalamnya terbuka pikiran dan mempertimbangkan bahwa mengadaptasi ide-ide baru dari luar adalah penting, daripada melihatnya sebagai sebuah ancaman.
- Ada organisasi yang mendorong inovasi. Orang terdorong untuk mengembangkan cara baru dalam melakukan sesuatu dan percaya diri bahwa ide akan dipertimbangkan dengan pikiran terbuka oleh orang lain.
- Ada individu atau kelompok orang yang memiliki ide terhadap arah kebijakan baru. Agen-agen perubahan ini membawa ide, menjelaskan kepada orang lain dan membangun konsesus terhadap posisi yang baru.
- Ada jejaring diseperti para agen perubahan yang akan merespon dan membantu mereka untuk mendorong proses.
- Ada organisasi yang secara struktur lebih fleksibel sehingga memungkinkan kelompok atau unit baru berkembang.
- Lembaga pembuat kebijakandan pelaksana kebijakan memiliki kewenangan cukup untuk mendorong kebijakan baru meskipun kurang mendapat dukungan luas.
- Ada sumberdaya di dalam organisasi untuk merespon cara baru dalam bekerja.
- Ada motivasi dan energi yang dibutuhkan untuk menggunakan dan memobilisasi sumberdaya dalam rangka mencapai tujuan dari inovasi kebijakan.

### BAB III

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan kebijakan pendidikan di Kota Makassar untuk menghentikan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Rumusan rekomendasi ini dicapai melalui tujuan khusus berikut ini: a) Memetakan hubungan antara pola-pola kekerasan mahasiswa dengan dalam sumber-sumber referensi yang menjustifikasi tindakan kekerasan. b) Menawarkan solusi-solusi yang dapat diupayakan oleh setiap stakeholder pendidikan di Kota Makassar untuk menghentikan kekerasan mahasiswa.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian dengan tema serupa yang telah ada namun dengan perspektif atau cara pandang yang berbeda yang tentunya lebih lengkap dari penelitian yang pernah dibuat. Nilai penting dari penelitian ini adalah memahami kekerasan mahasiswa di Kota Makassar secara lebih mendalam dan memberikan advokasi kepada pemangku kepentingan pendidikan di Kota Makassar untuk bersama-sama menghentikan kekerasan mahasiswa.

Hasil dari penelitian ini adalah masukan bagi perumus kebijakan pendidikan di Kota Makassar maupun di tingkat nasional tentang bagaimana memahami persoalan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan tawaran peta jalan (*road map*) untuk membuat kebijakan pendidikan serta model kebijakan pendidikan dalam rangka menghentikan lingkaran kekerasan mahasiswa atau meminimalisasi praktek kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.

Perlu juga ditegaskan bahwa keterbatasan penelitian ini adalah kapasitasnya dalam melaukan generalisasi karena hanya spesifik menjelaskan dan memahami kasus di Kota Makassar. Hal ini didasarkan pada asumsi kami terhadap hubungan yang sangat erat antara konteks dengan anatomi kekerasan. Setiap kasus kekerasan, anatominya sangat ditentukan oleh tempat (konteks) praktek kekerasan itu terjadi. Untuk itu, kami

menyarankan perlu dilakukan penelitian-penelitian lain dalam membuat kebijakan nir kekerasan di wilayah lain.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

**M**etode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam proposal ini kami (tim peneliti) paparkan mengenai asumsi-asumsi desain penelitian, prosedur pengumpulan data, prosedur pencatatan data, prosedur analisa data dan langkah-langkah pembuktian dengan mengacu pada model prosedur yang dijelaskan oleh John W. Creswell (2002: 138)

Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma yang berakar dalam antropologi budaya dan sosiologi. Pada umumnya, paradigma ini merupakan sebuah proses investigasi untuk memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengklasifikasikan subjek penelitian, yakni kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Beberapa asumsi teoritik dalam penelitian ini kami rumuskan sebagai berikut: kekerasan mahasiswa di Kota Makassar cenderung digunakan sebagai metode/alat untuk mendramatisasikan tuntutan-tuntutan (*instrumental*) maupun penegasan identitas (*constitutive*) yang telah terinternalisasi dalam perilaku keseharian mahasiswanya. Dari asumsi yang diangkat di dalam penelitian sebagaimana kami rumuskan di atas, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) yang membatasi penelitian pada bidang disiplin ilmu politik, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya kaitan dengan sosiologi, antropologi dan disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Penelitian ini bersifat interpretatif sehingga bias, nilai, dan penelitian kami akan kami nyatakan secara tegas dalam laporan penelitian. Penelitian ini membatasi subjek penelitian pada kasus-kasus kekerasan mahasiswa di Kota Makassar yang telah menjadi jalinan rantai yang sedemikian rupa sehingga sudah sangat mengkhawatirkan berbagai

pihak. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan ilmu politik, penelitian ini dilakukan selama 6 bulan di tahun 2011.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan: (a) Penetapan batas-batas penelitian. Penelitian ini membatasi subjek penelitian pada kasus-kasus kekerasan mahasiswa di Kota Makassar; (b) Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui pengamatan langsung, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, pengumpulan data-data dokumentasi dan data-data visual; dan (c) Penetapan prosedur untuk mencatat informasi dan/atau data.

Dalam penelitian ini pencatatan data dilakukan dengan: (a) Menyalin hasil wawancara sekomprensif mungkin yang didapatkan dari wawancara yang menggunakan audiotape ke dalam transkrip tulisan sehingga dapat dibaca; (b) Mencatat dokumentasi dan materi-materi dari para informan dan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian.

Prosedur analisa data dalam penelitian ini bersifat selektif (tidak semua data yang diperoleh dilaporkan/dijelaskan dalam penelitian) sejauh masih relevan dengan tema penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses analisa data dalam penelitian ini yaitu:

- Dalam analisa penelitian kualitatif ini, beberapa kegiatan yang menyita perhatian kami yaitu mengumpulkan informasi dari lapangan, menyortir informasi menjadi kelompok-kelompok, memformat informasi ke dalam sebuah cerita atau gambar, dan menuliskannya dalam naskah kualitatif;
- Kami akan mengambil informasi dan data dalam jumlah besar dan menguranginya hingga ke pola, pemetaan, kategori, atau tema tertentu dan kemudian menafsirkan informasi dan data tersebut dengan menggunakan sejumlah skema, diagram, tabel dan sebagainya sehingga menjadi lebih jelas;
- Setelah proses pengkategorian dan penafsiran data atau informasi yang diperoleh, kami akan melakukan identifikasi prosedur pengkodean yang akan digunakan untuk mengurangi informasi dan data sehingga menjadi tematik atau kategoris.

Untuk memastikan keabsahan internal, strategi-strategi berikut ini akan kami lakukan:

- a) Triangulasi data: data dikumpulkan melalui sumber-sumber majemuk untuk memasukkan wawancara, pengamatan dan analisa dokumen;
- b) Pemeriksaan anggota: informan berperan sebagai pemeriksa sepanjang proses analisa. Dialog yang berkesinambungan menyangkut interpretasi kami tentang realitas dan pihak-pihak lain di luar tim peneliti yang berkompeten akan memastikan kejujuran data;
- c) Pengamatan di lokasi penelitian: pengamatan tetap dan berulang terhadap fenomena dan latar serupa akan berlangsung di lokasi selama masa penelitian;
- d) Mode penelitian partisipatif: informan dilibatkan dalam sebagian besar tahap penelitian, dari pencarian data penelitian di lapangan hingga pemeriksaan penafsiran dan kesimpulan;

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

*Wicked problems require innovative, comprehensive solutions that can be modified in the light of experience and on-the-ground feedback. All of the above can pose challenges to traditional approaches to policy making and programme implementation.*  
(Australian Public Service, 2007)

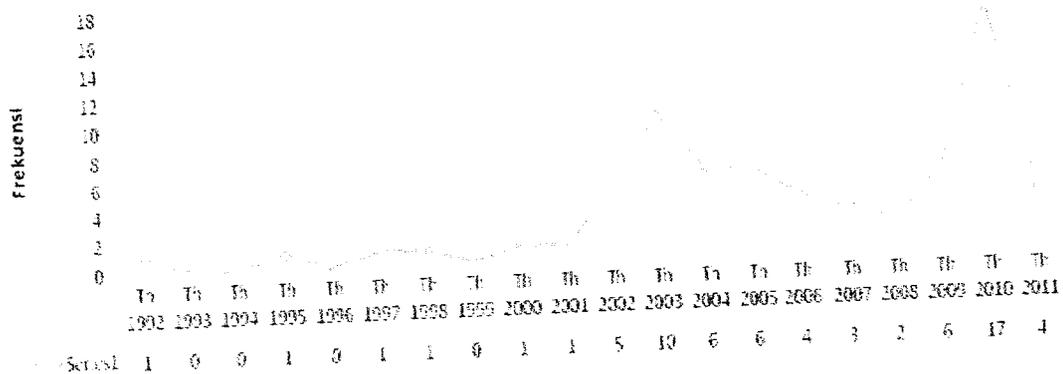
**D**alam studi kebijakan tantangan terbesar yang pertama-tama harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan adalah kemampuan untuk memahami dan merumuskan permasalahan kebijakan. Kegagalan dalam memahami dan merumuskan masalah kebijakan akan berdampak negatif pada keluaran kebijakan. Sebaliknya, hasil rumusan permasalahan kebijakan yang baik justru akan memudahkan para pembuat kebijakan dalam menghasilkan produk kebijakan yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah. Memahami dan merumuskan masalah kebijakan bukanlah perkara mudah. Pada banyak kasus, terdapat masalah kebijakan yang ruwet atau kompleks sehingga membutuhkan energi dan kapasitas yang mumpuni dari para pembuat kebijakan untuk sekadar memahami dan merumuskan masalah kebijakan. Masalah dengan karakteristik yang demikian umumnya disebut sebagai *'wicked' policy problem* (masalah kebijakan bapet). Sementara banyak juga masalah kebijakan yang karakteristiknya tidak terlalu kompleks atau sederhana yang terkadang solusi kebijakannya dapat bersandar pada perkara teknikalitas semata. Untuk masalah dengan karakteristik ini disebut *'tame' policy problem* (masalah kebijakan jinak).

Setelah berhasil memahami dan merumuskan masalah kebijakan tantangan berikutnya bagi pembuat kebijakan adalah mencari strategi terbaik dalam merumuskan/membuat kebijakan. Untuk mengatasi masalah kebijakan yang bapet (*wicked*) penggunaan strategi yang biasa tidak akan menghasilkan kebijakan efektif. Para pembuat kebijakan perlu berpikir keras untuk menangkap gambar

besar/menyeluruh dari persoalan sirkuit kekerasan mahasiswa. Ini termasuk melacak dan memergoki inter-relasi faktor-faktor penyebab dan pokok-pokok penyebab.

Kekerasan mahasiswa di Kota Makassar adalah kejadian yang kompleks. Perulangan kejadian semenjak tahun 1990an hingga saat ini, dengan intensitas dan kualitas yang beragam, menandakan bahwa jalinan konflik dan kekerasan telah menciptakan sirkuit kekerasan di kalangan mahasiswa (lihat gambar 3). Sebuah sirkuit yang mendominasi tentang cara-cara mahasiswa dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dengan segala bentuk karakteristik keruwetannya, menempatkan sirkuit kekerasan sebagai salah satu contoh masalah kebijakan bapet (*wicked problem*) tentunya sangat relevan. Produk-produk kebijakan yang telah dibuat oleh institusi univeristas (perguruan tinggi) dapat dikatakan tidak cukup efektif menghentikan kekerasan di kalangan mahasiswa karena masalah tersebut selalu mengalami perulangan. Ini adalah salah satu wujud karakteristik dari masalah bapet kebijakan.

Gambar 3 . Jumlah Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar



Pada bagian ini, kami akan mengelaborasi dua hal yang menjadi temuan dalam penelitian. Pertama, bagaimana memahami dan merumuskan masalah kebijakan, dalam hal ini adalah kekerasan mahasiswa. Untuk bisa sampai kesana analisa dan pelacakan terhadap anatomi kekerasan menjadi topik utama pembahasan. Kedua, bagaimana strategi perumusan dan model kebijakan yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan kekerasan mahasiswa. Di sini pembahasan akan difokuskan pada

bagaimana proses pembuatan kebijakan dibuat dan perspektif apa yang dapat digunakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan di Kota Makassar.

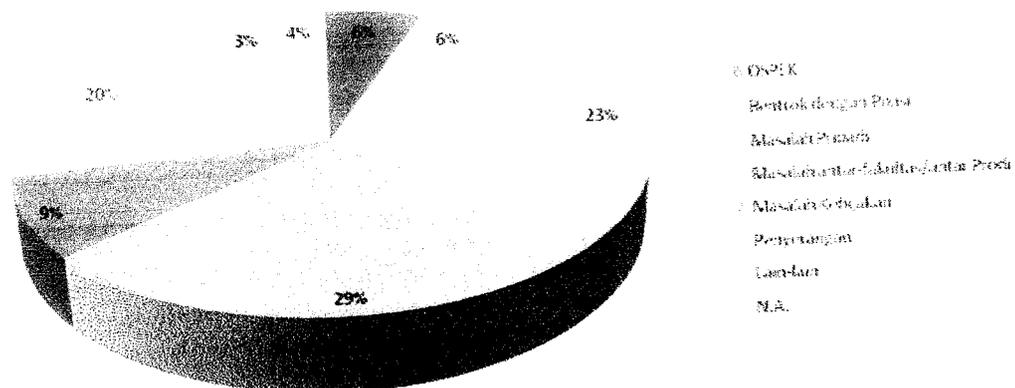
## 1. Melacak Kekerasan: Pendekatan Akar Permasalahan dan Strategi

### 1.1. Perspektif Akar Masalah

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis dua penelitian yang dilakukan oleh Ali Sahab (2011) tentang analisa kultural politik kekerasan mahasiswa di Kota Makassar dan penelitian Siti Aminah (2011) tentang kontruksi sosial kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Kedua penelitian ini menitikberatkan pada pandangan kekerasan sebagai akar masalah. Dalam penjelasannya, Siti Aminah mengatakan fenomena sosial kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Makassar merupakan produk tindakan-tindakan individual dan juga kolektif dimana struktur sosial dan politik objektif dan representasi subjektif mahasiswa sebagai pelaku terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi. Artinya, keduanya tidak saling menafikan, tapi berkelindan dalam sebuah praktik kekerasan. Oleh karena itu, logika tindakan kekerasan mahasiswa memiliki dimensi rasionalitas dan irasionalitas.

Aksi-aksi mahasiswa di Makassar juga muncul akibat ketidakpuasan yang akumulatif, dan terjadi terus menerus. Kekecewaan, kemarahan yang diekspresikan dengan kegiatan demonstrasi merupakan cara mahasiswa dalam merespon kebijakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada juga fenomena kekerasan berupa aksi-aksi tawuran sesama mahasiswa serta tindakan beringas (vandalisme) mahasiswa dengan memblokir jalan, membakar ban mobil di tengah jalan telah menyebabkan dampak yang merugikan masyarakat. Kekerasan mahasiswa merupakan refleksi dari ketidakteraturan masyarakat. Ketidakteraturan itu sebagai respon terhadap perilaku represif aparat keamanan (polisi) dan juga bias disebabkan oleh kekecewaan pada sistem sosial yang ada. Berikut ini adalah pemicu kekerasan mahasiswa yang terjadi di Kota Makassar 1992-2011.

Gambar 5. Pemicu Kekerasan



Kekerasan mahasiswa sebagai akibat dari pengabaikan eksistensinya sebagai kekuatan moral dan kekuatan kontrol. Nilai-nilai moral mahasiswa telah tergerus oleh kepentingan praktis dan pragmatis. Dalam hal ini, ada nilai-nilai tertentu yang sengaja diupayakan, ditinggalkan oleh mahasiswa meski nilai-nilai itu memainkan peranan penting/pokok. Tindakan-tindakan nyata mahasiswa lebih mengacu pada nilai-nilai pragmatis jangka pendek untuk memajukan kepentingannya sendiri sebagai individu bukan sebagai mahasiswa. Dalam hal ini terlihat mahasiswa sudah menjauhkan dirinya sebagai kekuatan moral, justru membenamkan diri sebagai kekuatan politik yang terlepas dari kepentingan moral. Hal ini merusak tatanan keselarasan dalam kehidupan kampus dan masyarakat umumnya. Nilai-nilai ideal dan moral tidak lagi dijunjung dipegang teguh. Gerakan mahasiswa di kampus dan di luar kampus karenanya perlu dirubah saat karena sudah tidak murni gerakan mahasiswa.

Posisi pelaku kekerasan selalu terkait dengan ruang dan konteks yang ditempati sehingga tidak lepas dari struktur yang melingkupinya. Aspek rasional dari kekerasan adalah untuk keperluan aktualisasi diri di luar bidang akademik. Sedangkan aspek irasionalitasnya adalah mereproduksi budaya kekerasan itu sendiri. Ada logika praksis yang menyebabkan berulang-ulangnya kejadian kekerasan sehingga menjadi habitus.

Aspek rasionalitas dan irasionalitas merupakan satu kesatuan yang bersifat dualistis yang bergerak dalam ranah struktur dan kultur.

Untuk mengatasi kekerasan mahasiswa dibutuhkan strategi edukatif. Strategi ini fokus pada upaya untuk menghasilkan pelaku sosial yang mampu memperbaiki cara-cara dalam artikulasi aspirasi dan kepentingannya melalui pengembangan sistem pendidikan melalui penguatan kemampuan berolah nalar dalam tataran praksis maupun akademis.

Mahasiswa sebagai habitus kekerasan dan kampus merupakan arena tempat diproduksi dan direproduksi berbagai bentuk kekerasan itu. Sebagai habitus, perilaku kekerasan merupakan perilaku kolektif yang dieskpresikan dalam bentuk tawuran, perkelahian, pengeroyokan, demonstrasi antara mahasiswa antar fakultas, antar universitas, antar organisasi intrakampus, antar organisasi ekstrakampus dan perkelahian antara aparat keamanan dan mahasiswa dan sebagainya. Konflik secara terbuka itu terjadi pada tahun 1998 ke atas, begitu signifikan peningkatannya. Tetapi akhir-akhir ini sejak tahun 2010 konflik antarmahasiswa sudah berkurang. Penjelasan ini dapat ditafsirkan sebagai fenomena kekerasan itu terjadi berulang-ulang, dari tahun ke tahun dan fenomena itu dapat disebut sebagai indikasi dari reproduksi kekerasan.

Dalam konteks ini, secara nyata kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa bukan hal yang berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh faktor sosial artinya ada peran faktor struktur menyebabkan terjadinya kekerasan itu. Struktur kampus, pemerintahan lokal setempat, dan struktur masyarakat. Struktur kampus mulai dari jenjang kuasa tertinggi yaitu Rektor sampai pada jenjang di tingkat Fakultas berperan dalam munculnya praktik kekerasan mahasiswa. Kampus bukan ajang regulasi aparat akademis untuk melucuti kekuatan mahasiswa, tetapi kampus adalah arena akademik tempat mengasah nalar yang bermental akademis dan bermoral.

Demikian pula dengan struktur pemerintahan lokal yang ada di Makassar bukan suatu lembaga alih-alih kekuasaan yang dibangun dengan sistem klientisme maupun paraohialisme, tetapi sebagai tempat kerja birokrat dalam menjalankan obligasi-obligasinya untuk melayani publik sesuai dengan wewenangnya. Karena itu, pemerintah

lokal seharusnya dapat membaca dan mengambil sikap apabila kekerasan mahasiswa itu telah melampaui kelaziman. Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan regulasi untuk mencegah kekerasan yang diikuti dengan perusakan fasilitas publik.

Mahasiswa sebagai aktor intelektual yang berada dalam arena kampus memiliki kebebasan berelasi dengan aktor-aktor yang ada (ekonomi, politik) di arena kampus maupun di luar kampus. Yang paling mengesankan adalah kemampuan mahasiswa untuk mengeksploitasi nilai budaya yang ada di masyarakat, nilai kekerasan budaya. Nilai-nilai kekerasan itu melingkungi keseharian mahasiswa, nilai itu nyata dan dipraktikkan. Hingga pada akhirnya, mahasiswa menjadi terbiasa untuk melakukan kekerasan bahkan kekerasan mahasiswa sudah distigma sebagai identitas baru mahasiswa dan ironisnya kekerasan dianggap sudah menyatu dengan kehidupan mahasiswa. Artinya, eksistensi mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, lingkungannya dan *atau* sistem sosial budayanya.

## 1.2. Celah Kosong: Kekerasan Sebagai Strategi

Pada bagian ini kami akan mengeksplorasi celah kosong yang ditinggalkan oleh pendekatan akar permasalahan (*root causes*) dalam memahami kekerasan mahasiswa. Analisa kekerasan mahasiswa dengan menggunakan perspektif sosial-budaya dan ekonomi-politik berangkat dari asumsi bahwa kekerasan merupakan produk dari permasalahan sosial-budaya dan ekonomi-politik. Permasalahan tersebut antara lain dapat berupa konsep dan praktek budaya kekerasan yang tereproduksi (*cultural violence*), pertarungan kepentingan ekonomi-politik elit (*interest*), segregasi sosial (*segregation*), hingga ketidakadilan struktural (*injustice*). Kekerasan dalam pendekatan ini merupakan respon balik dari persoalan-persoalan tersebut. Kesimpulan-kesimpulan yang dibangun dari analisa pendekatan akar permasalahan mendapat justifikasi ketika perspektif psikologi menilai sifat alamiah manusia yang memiliki sisi baik (*good*) dan sisi jahat (*evil*). Kekerasan kemudian dipahami sebagai bentuk impuls dari sisi buruk alamiah manusia dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Dampak lebih lanjut dari cara pandang yang demikian adalah munculnya pemrofilan (*profiling*) binaris tentang

manusia baik dan manusia jahat; tentang kebudayaan beradab dan kebudayaan tidak beradab; tentang masyarakat halus dan masyarakat kasar dengan segala instrumen maupun indikator-indikator penilaiannya.

Dalam banyak hal pendekatan akar permasalahan dan para pendukungnya memberikan kontribusi cukup baik tentang bagaimana memahami kekerasan. Akan tetapi dalam analisa akhirnya pendekatan ini cenderung melakukan simplifikasi, kalau bukan dikatakan terjebak, yang berujung pada pemrofilan terhadap pelaku/institusi ke dalam dikotomi binaris. Pada titik ini, pendekatan kekerasan sebagai strategi menemukan signifikansi dalam menjelaskan dan memahami kekerasan mahasiswa. Pendekatan kekerasan sebagai strategi memusatkan perhatian dan analisisnya pada pertanyaan-pertanyaan seperti: Mengapa mahasiswa melakukan kekerasan?; Atas dasar pertimbangan apa mahasiswa melakukan kekerasan?; Bilamana kekerasan mengambil bentuk dalam kondite tertentu? Narasi pada paragraf-paragraf berikut ini akan menjelaskan dasar pemikiran dan analisa kekerasan mahasiswa di Kota Makassar sebagai strategi.

#### *Atas Nama Identitas*

Kekerasan mahasiswa bukanlah potret kegagalan institusi-institusi pendidikan semata melainkan juga kegagalan dari institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik dalam mempromosikan budaya-budaya non-kekerasan. Dalam studi tentang politik identitas, setiap individu tersemat beragam identitas (multi-identity). Oleh karena itu harus dipahami bahwa seseorang memiliki identitas sebagai mahasiswa karena terdaftar pada salah satu institusi pendidikan tinggi, namun ia juga memiliki identitas-identitas lain, seperti: warga negara Indonesia, anggota organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lahir dari suku/etnis tertentu, pengurus partai politik, anak pejabat pemerintahan, pemeluk agama tertentu, dst. Identitas-identitas ini ada dan mengalami penguatan karena subjek berhasil mendefinisikan dan membedakan dengan "yang lain" (*liyan/other*). Mahasiswa itu ada karena ada definisi untuk kelompok yang masuk kategori mahasiswa dan bukan mahasiswa. Demikian halnya dengan keberadaan suku Makassar, warga negara Indonesia, organisasi HMI, muslim, dst. Setiap identitas

memiliki nilai dan norma tersendiri yang terkadang dijadikan sebagai pembeda (konstitutif) antara identitas satu dengan identitas lainnya. Kepekaan sebuah kebijakan terhadap kondisi subjektif-objektif (*co-text*) akan menentukan seberapa efektifitas kebijakan tersebut dapat menyelesaikan persoalan.

Keberadaan identitas yang bergantung atas perbedaan dan hadir (dan tereproduksi) secara terus menerus dalam masyarakat dijelaskan oleh William E. Connolly secara gamblang dalam bukunya *Identity/Difference: Democratic Negotiation of Political Paradox* (1991). Menurut Connolly:

*An identity is established in relation to a series of differences that have become socially recognized. These differences are essential to its being. If they did not coexist as differences, it would not exist in its distinctness and solidity. Entrenched in this indispensable relation is a second set of tendencies, themselves in need of exploration, to congeal established identities into fixed forms, thought and lived as if their structure expressed the true order of things. When these pressures prevail, the maintenance of one identity (of field of identities) involves the conversion of some difference into otherness into evil, or one of its numerous surrogates. Identity requires differences in order to be, and it converts difference into otherness in order to secure its own self-certainty* (Connolly, 1991: 64)

Pembacaan terhadap kekerasan mahasiswa yang terjadi di Kota Makassar menemukan relevansinya dalam perspektif pertarungan identitas (*identity contention*). Pertarungan identitas di sini tidak hanya sekadar pertarungan antara identitas dominan dengan marginal untuk mengukuhkan hegemoni identitas dominan tetapi juga pelbagai wujud aktualisasi identitas dalam arena yang dinamis/tekontestasi.

Kekerasan mahasiswa di berbagai universitas di Kota Makassar memiliki berberapa bentuk, yaitu: perkelahian masal mahasiswa antar-fakultas ataupun intra-fakultas dalam satu universitas; bentrokan mahasiswa dengan melibatkan aparat kepolisian, satuan pengamanan kampus, dan instansi pemerintahan biasanya terjadi pada saat mahasiswa menggelar demonstrasi/unjuk rasa; bentrokan mahasiswa dengan masyarakat. Perkelahian masal sesama mahasiswa antar-fakultas ataupun intra-fakultas merupakan bentuk yang seringkali terjadi di beberapa universitas di Kota Makassar.

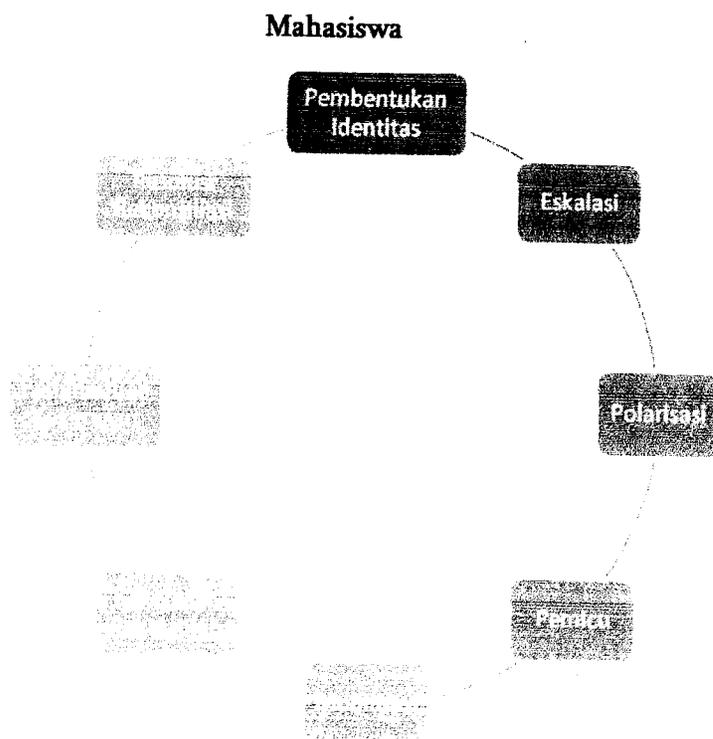
Umumnya perkelahian antar-mahasiswa pada hampir sebagian besar kejadian melibatkan mahasiswa dari Fakultas Teknik, seperti yang pernah terjadi di Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas 45, maupun Universitas Muslim Indonesia.

Perkelahian masal antar-mahasiswa terjadi karena kuatnya identitas fakultas dan program studi dalam setiap individu mahasiswa ketika berada di lingkungan universitas (kampus). Identitas ini dengan sendirinya akan memudar atau berganti ketika individu berada di luar kawasan universitas/kampus. Ini setidaknya terbukti bahwa hampir tidak ada kejadian perkelahian masal antar-mahasiswa dengan menggunakan bendera identitas fakultas/program studi yang terjadi di luar universitas/kampus. Superioritas keilmuan yang terinstitusionalisasi ke dalam fakultas dan program studi merubah menjadi superioritas identitas fakultas/program studi, menisbikkan keberadaan ilmu-ilmu lain yang terkatagori ke dalam fakultas-fakultas dan program studi lain. Rendahnya intensitas interaksi di dalam kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik yang jauh dari petensi munculkan kekerasan menyebabkan hilangnya perasaan keberagaman dan lemahnya penggunaan pendekatan interdisiplin dalam pemecahan masalah di ranah akademik.

Dalam derajat tertentu, studi kami menunjukkan adanya kesamaan proses kekerasan di setiap universitas ketika berhubungan dengan perkelahian masal mahasiswa antar-fakultas. Proses tersebut diawali dengan adanya kondisi pembentukan identitas; eskalasi; polarisasi; pemicu; mobilisasi; kekerasan (perkelahian masal); penghentian kekerasan; dan resolusi/rekonsiliasi (dalam beberapa kasus resolusi ataupun rekonsiliasi bahkan tidak dilakukan). Proses ini memiliki kemiripan dengan teori *Dinamic of Contention* (DoC) yang diperkenalkan oleh (McAdam, Tarrow, dan Tilly, 2001 seperti dijelaskan oleh Klinken, 2007). Berikut adalah gambar proses kekerasan mahasiswa.

**Gambar 3. Proses Kekerasan Mahasiswa**

Gambar 3. Proses Kekerasan



Fase pembentukan identitas menerangkan tentang bagaimana identitas bersama berkembang dalam sebuah kelompok. Dalam konteks kekerasan mahasiswa, fase pembentukan identitas pertama-tama terjadi ketika individu diterima sebagai mahasiswa di salah satu fakultas atau program studi. Kegiatan-kegiatan orientasi yang selenggarakan secara formal juga informal oleh para senior dan institusi fakultas serta program studi berusaha menanamkan identitas baru kepada mahasiswa. Tentunya, identitas yang ditanamkan fakultas atau program studi berbeda dengan identitas fakultas lain ataupun program studi lain. Proses ini tidak hanya berhenti ketika kegiatan orientasi mahasiswa baru selesai melainkan terus-menerus berlangsung selama individu tersebut masih terdaftar sebagai mahasiswa dalam program studi dan fakultas tertentu. Sementara pembentukan identitas universitas tidak berlangsung lebih intensif dibanding pembentukan identitas fakultas/program studi. Hal tersebut disebabkan kadar intensitas dan interaksi mahasiswa dengan universitas lebih rendah dibanding dengan fakultas/program studi.

antar-identitas. Keberadaan (*being*) sebuah identitas memprasyaratkan adanya perbedaan dengan identitas yang lain. Semakin kokohnya sebuah identitas semakin tajam tingkat perbedaan dengan identitas lain. Konflik hakekatnya adalah perbedaan (berbeda) namun adanya konflik tidak selalu ada kekerasan. Dari sini mulai timbul benih-benih konflik antar-identitas.

Fase polarisasi adalah kelanjutan dari pembentukan identitas dan eskalasi. Fase ini merupakan konsekuensi dari terbentuk identitas di masing-masing institusi dan eskalasi konflik antar-identitas. Ruang-ruang sosial antara identitas satu dengan identitas lain yang saling berseteru meluas ketika para individu saling bergeser ke arah titik-titik eksterim. Identitas sebagai mahasiswa Fakultas Teknik akan berbeda dengan mahasiswa FISIP, mahasiswa Teknik Kelautan akan berbeda dengan Teknik Mesin, mahasiswa Ilmu Politik akan berbeda dengan mahasiswa Sosiologi, dan seterusnya. Istilah *in-group* dan *out-group* menjadi preseden untuk menuju tahap selanjutnya.

Fase pemicu adalah fase dimana konflik berubah menjadi kekerasan. Ketika fase-fase di atas telah dilalui maka kekerasan hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Penting untuk diperhatikan adalah kekerasan tidak selalu terjadi karena adanya kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian sepele dan sederhana sangat mungkin berubah menjadi kekerasan/perkelahian. Banyak kasus kekerasan/perkelahian mahasiswa yang terjadi di berbagai universitas di Kota Makassar dimulai dari perseteruan antar-individu. Perkara-perkara seperti saling ejek antar mahasiswa dari fakultas yang berbeda, pacar yang digoda oleh mahasiswa dari fakultas lain, pertandingan olahraga, dan lain-lain bisa berubah menjadi kekerasan/perkelahian antar-mahasiswa.

Fase mobilisasi merupakan upaya untuk menggerakkan pihak-pihak kedua (pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik) agar terlibat terjun dalam konflik dan kekerasan. Mobilisasi akan berhasil ketika pihak yang berkonflik (pihak pertama) mampu mengedepankan isu sentimen keterancaman identitas dan atas nama solidaritas. Konflik atau pertikaian antara dua mahasiswa dari fakultas yang berbeda dapat meluas ketika masing-masing pihak mampu memobilisasi kelompoknya (anggota identitasnya).

Untuk mobilisasi massa tidak perlu waktu lama seandainya tiga fase sebelumnya telah terbentuk.

Fase kekerasan/perkelahian menunjukkan bagaimana praktek ini terjadi. Hal yang menarik untuk dilihat dari fase ini adalah target-target kekerasan/perkelahian. Target kekerasan tidak hanya melukai atau bahkan membunuh individu identitas seteru tetapi juga pengerusakan properti yang menjadi simbol-simbol identitas seteru, seperti: gedung dan bangunan perkuliahan, kendaraan, dll. Juga yang harus dilihat lebih mendalam dalam kejadian kekerasan/perkelahian adalah orientasi atau motif dari para aktor. Tidak semua aktor yang terlibat dalam kekerasan/perkelahian didasarkan atas hasrat kebencian untuk melukai atau menghilangkan identitas lain, tetapi juga ada aktor-aktor yang sekadar merayakan (selebrasi) kekerasan itu sendiri atau mendapatkan momentum untuk melakukan kekerasan dan pengerusakan sebagai bentuk pelampiasan atas kekecewaan yang sumbernya tidak berhubungan dengan pemicu.

Fase penghentian kekerasan merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan meluasnya kekerasan. Upaya ini dilakukan oleh pihak kedua dan pihak ketiga, bisa keamanan kampus, pejabat kampus, maupun aparat kepolisian. Ketegasan, kecermatan, dan kehati-hatian para pihak yang menghentikan kekerasan sangat berpengaruh pada kecepatan dan keluasan penghentian kekerasan/perkelahian.

Fase resolusi dan rekonsiliasi adalah fase penting dalam mengelola konflik kekerasan. Kekerasan yang terus berulang menandakan adanya kegagalan dalam mengelola konflik. Studi kami di Kota Makassar menunjukkan lemahnya pihak-pihak yang memiliki kewenangan (pejabat kampus maupun aparat keamanan) dalam mengawal fase resolusi dan rekonsiliasi. Bahkan dalam beberapa kasus kekerasan dan perkelahian mahasiswa ternyata tidak diikuti dengan upaya untuk resolusi dan rekonsiliasi. Kalaupun proses ini dilakukan, upaya yang ada tidak menyeluruh dan tidak tepat sehingga terkesan sebatas memadamkan api tanpa menjinakan sumber api yang masih membara yaitu perseteruan identitas.

### 1.3. Kekerasan Sebagai Strategi: Penyesuaian Bahasa dan Efektifitas

*Dalam pengertian yang agak mengerikan, kekerasan adalah salah satu bagian dari politik formal.*

(Klinken, 2007: 11)

Kutipan di atas memberikan gambaran yang sangat kuat sekaligus reflektif tentang bagaimana memahami kekerasan. Kekerasan bukan sekadar hasil tetapi cara atau strategi dalam mencapai tujuan. Konsepsi ini bukanlah hal baru dalam kajian kekerasan melainkan konsep yang telah tercermin dalam berbagai fenomena sosial politik pada masa lampau. Bentuk sempurna dari konsepsi ini adalah realitas tentang terorisme. Namun yang penting untuk ditelaah lebih jauh dalam kasus kekerasan mahasiswa di Kota Makassar adalah penjelasan tentang bilamana dan bagaimana kekerasan sebagai strategi tercermin dalam kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Untuk menjawabnya, kami perlu mundur ke belakang untuk mencermati praktek politik kekuasaan negara.

Kajian-kajian tentang kekerasan tidak dapat terlepas dari (praktek) kekuasaan. Jika pelacakan dimulai dari sebelum terbentuknya negara bangsa (negara modern) maka praktek-praktek kekerasan dalam upaya menegakan tatanan (*order*) masyarakat telah terjadi pada masa berkuasanya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Raja atau Sultan dengan segala bentuk institusi kerajaan dan kesultanan memiliki legitimasi dalam mempraktekan kekuasaannya melalui penggunaan kekerasan. Konsep-konsep praktek kekuasaan, seperti: 'penguasa di bumi' dan 'kepanjangan dari kekuasaan Tuhan' termanifestasi dalam hubungan antara 'raja/sultan-rakyat' atau 'kawula-gusti'. Nilai-nilai dan norma-norma yang dikembangkan melalui rumusan adat istiadat mengalami reproduksi dan tersebarluaskan dalam teritori kerajaan atau kesultanan. Berbeda dengan negara modern yang memiliki delimitasi teritori dengan negara tetangga, praktek kekuasaan (kekerasan) di dalam sebuah kerajaan/kesultanan hanya terjadi pada daerah pusat hingga *frontier*. Semakin dekat dengan pusat maka praktek kekuasaan dan

kekerasan akan semakin kental, sebaliknya praktek kekuasaan dan kekerasan akan semakin melemah ketika menjauh dari pusat.

Pada masa kolonial praktek kekuasaan tidak hanya terjadi pada nilai dan norma yang berkembang di masyarakat tetapi tersemat dalam sistem administrasi dan tata hukum. Kedua yang terakhir ini yang lebih mendominasi praktek kekuasaan dan kekerasan pemerintah kolonial. Jika pada era kerajaan/kesultanan efektifitas praktek kekuasaan/kekerasan dapat dirangkum dalam hubungan 'kawula-gusti', maka praktek kekuasaan/kekerasan pada masa pemerintahan kolonial hanya dapat efektif dengan bantuan 'penguasa antara'. Hubungan yang terbentuk tidak langsung antara pemerintah kolonial-rakyat, melainkan terjembatani oleh 'penguasa antara', yaitu: elit-elit penguasa lokal dari golongan keluarga kerajaan/kesultanan dan kalangan terdidik. Mereka adalah birokrat-birokrat yang menjadi pelaksana agar sistem administrasi dan tata hukum kolonial bekerja sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial. Posisinya yang strategis menempatkan mereka sebagai pewaris pengetahuan dan teknik penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan hukum kolonial. Lebih dari itu, praktek-praktek kekerasan sebagai strategi untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan dan tata hukum ikut terwarisi dan terinternalisasi dalam cara berpikir dan bertindak. Dengan segala kecakapan yang dimilikinya menjadi tidak mengherankan jika mereka kemudian menduduki posisi-posisi sangat penting pada saat Negara Indonesia terbentuk.

Politik Indonesia pasca kemerdekaan hingga pemerintahan Orde Baru dicirikan kuatnya kekuasaan presiden, birokrasi, dan tentara. Ketiga institusi ini menjelma menjadi mesin penyangga dan pengaman tatanan kekuasaan (hubungan antara negara-warganegara). Praktek kekuasaan yang diselenggarakan oleh institusi-institusi politik modern tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai dan norma-norma lama yang telah hadir sebelumnya. Konsep-konsep penyelenggaraan pemerintahan modern mengalami hibridasi ketika elit-elit penguasa, birokrasi, dan tentara turut mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Label-label politik Indonesia, seperti: negara (neo) patrimonial, negara birokratik, *state qua state*,

hingga negara otoritarian birokratik merupakan refleksi dari sistem dan praktek kekuasaan yang bekerja, setidaknya, hingga pemerintahan Orde Baru berakhir.

Kuatnya pengaruh institusi militer memberikan warna dalam penyelenggaraan pemerintahan di era Orde Lama maupun Orde Baru. Militerisme dan militeristik menjadi perangkat strategi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Akibat, kepatuhan masyarakat dibangun dengan menggunakan instrumen-instrumen kekerasan fisik maupun struktural. Program-program pembangunan terlaksana berkat kerja kolaborasi antara birokrasi dan militer. Berbagai kasus kekerasan yang merebak di Indonesia pada era ini selalu melibatkan aparat birokrasi dan keamanan. Model ini sangat efektif dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa, pelaksanaan pembangunan, bahkan meredam pergolakan di daerah. Satu kesimpulan yang dapat ditarik dari praktek-praktek kekuasaan pada masa ini adalah penggunaan kekerasan sebagai bahasa rejim.

Komunikasi akan berjalan efektif jika pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan dan penerima pesana menggunakan bahasa yang sama. Jika masyarakat telah terbiasa dengan bahasa kekerasan dan praktek kekerasan yang dipertontonkan oleh pemerintah sangat efektif dalam mewujudkan tujuannya maka tidaklah mengherankan jika masyarakat mempergunakan bahasa dan praktek kekerasan sebagai opsi utama dalam mewujudkan tujuan dan kepentingannya. Kondisi ini menandakan bahwa bahasa dan praktek kekerasan juga dipergunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan setiap masalah dan dalam mencapai tujuan atau kepentingannya. Bahasa dan praktek ini sudah terinternalisasi hampir disetiap individu mahasiswa.

Selain itu perspektif ruang juga dapat menjelaskan pandangan kekerasan sebagai strategi. Perspektif ruang berangkat dari hipotesis bahwa Kota Makassar sebagai ruang tempat berkumpulnya subjek-subjek yang memiliki pengalaman kedekatan dengan kekerasan sehingga memampukan wacana kekerasan berkembang dan dipraktikkan. Kota Makassar adalah kota terbesar di wilayah timur Indonesia. Selain sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia Timur, Makassar secara simulatan menyuplai elit-elit politik di tingkat nasional. Keberadaan elit-elit ini dipentas politik nasional

seringkali diidentikan sebagai representasi masyarakat Indonesia Timur. Pertumbuhan kota dengan dukungan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik turut menjadikan Makassar sebagai tempat bertemunya penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia Timur. Keberadaan infrastruktur pendidikan yang lebih baik, misalnya, mendorong pemuda-pemuda yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia Timur untuk menimba ilmu di Kota Makassar. Faktanya mereka memiliki pengalaman dan interaksi yang sangat dekat dengan kekerasan. Hampir sebagian besar dari pendatang berasal dari daerah-daerah konflik-kekerasan. Dengan demikian, berkumpulnya penduduk untuk kepentingan ekonomi, politik, dan pendidikan di kota ini menyebabkan Makassar menjelma menjadi kota dengan tingkat keberagaman, interaksi, dan kompetisi yang paling tinggi di Indonesia Timur.

## 2. Kebijakan Pendidikan: Mengisi Celah Kosong

Dalam penelitian ini, penelusuran hubungan antara kekerasan mahasiswa dan kebijakan pendidikan menemukan tiga isu yang mempertemukan antara keduanya, yaitu: kurikulum, organisasi mahasiswa intra-ekstra kampus, dan eksternalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kebijakan kurikulum berkaitan dengan: muatan matakuliah yang mengedepankan pembentukan identitas mahasiswa sebagai intelektual ketimbang identitas universitas, fakultas, ataupun program studi; muatan matakuliah yang mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme, nir-kekerasan dan perdamaian, Hak Azasi Manusia, dan toleransi. Kebijakan organisasi mahasiswa intra-ekstra kampus berkaitan dengan penataan organisasi mahasiswa yang memfasilitasi dan menunjang proses pembelajaran (kognitif), kehidupan bermasyarakat (advokasi), dan afeksi. Terakhir adalah kebijakan eksternalitas perguruan tinggi yang berkaitan antisipasi dampak-dampak negatif dari berlangsungnya kegiatan pendidikan di daerah. Tawaran kebijakan ini adalah pelibatan *stakeholder* daerah dalam mengantisipasi eksternalitas.

Dari penelusuran kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional berkaitan dengan tiga isu di atas, kami membagi menjadi dua level, yaitu kebijakan

yang tidak memiliki keterkaitan langsung (Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi) dan kebijakan yang memiliki keterkaitan langsung (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, SK Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, SK Dirjen Dikti No: 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, SK Dirjen Dikti No: 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi)

***Kurikulum: Internalisasi dan Inter-disiplin Ilmu***

Di dalam SK Mendiknas UU No. 232/U/2000, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Dari regulasi yang sama, kurikulum dalam pendidikan tinggi dibagi menjadi lima kelompok matakuliah, yaitu Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)<sup>1</sup>, Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)<sup>2</sup>, Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)<sup>3</sup>, Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)<sup>4</sup>, dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

<sup>2</sup> Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

<sup>3</sup> Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

<sup>4</sup> Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

<sup>5</sup> Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Sementara itu, terdapat juga katagori kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi yaitu: Kurikulum Inti dan Kurikulum Institutional<sup>6</sup>. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya. dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkisar antara 40% - 80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana. Kurikulum institutional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama. dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.

Di dalam penyusunan kurikulum dan matakuliah yang telah diatur secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Nasional menyiratkan tiga acuan yang menjadi kerangka hasil dari penyelenggaraan pendidikan, yaitu: internalisasi nilai-nilai keagamaan dan keindonesiaan (MPK), kapasitas kognitif berdasarkan bidang keilmuan (MKK dan MKB), dan kapasitas afektif bermasyarakat (MPB dan MBB). Pada pembedangan untuk keluaran yang akan dihasilkan dari proses belajar dan mengajar di perguruan tinggi ini seharusnya sudah mampu mengantisipasi ataupun meminimalisasi munculnya praktek-praktek kekerasan yang disebabkan oleh menguatnya identitas-

---

<sup>6</sup> SK Mendiknas UU No. 232/U/2000.

keberadaan manfaat dan kontribusi bidang-bidang ilmu lainnya. Kondisi ini berimbas pada menguatnya identitas mahasiswa berdasarkan bidang ilmu yang dipelajari. Lebih lanjut, persaingan dan konflik antar-mahasiswa menunjukkan masalah yang dikontestasikan bukan pada subjek bidang keilmuan tetapi lebih pada subjek yang memiliki identitas keilmuan.

Persoalan-persoalan tersebut mengerucut pada pentingnya reformulasi kurikulum. Menurut pandangan Wakil Rektor UMNN, Prof. Imam Suyitno perlu ada pola perkuliahan baik itu tatap muka maupun ekstra kulikuler yang di desain untuk menyatukan seluruh mahasiswa dalam satu kelas. Selain itu, juga diperlukan pendidikan karakter bagi mahasiswa agar suasana akademis kampus bisa terbangun dengan baik.<sup>7</sup>

#### *Organisasi Mahasiswa: Inkusif*

Di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 /U/1998 tentang

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Organisasi-organisasi ini menaungi kegiatan kurikuler<sup>8</sup> dan ekstrakurikuler.<sup>9</sup> Dalam penyelenggaraannya organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Kebijakan ini juga

<sup>7</sup> Wakil Rektor III UMN Prof Iman Suyitno dalam FGD Wakil Rektor.

<sup>8</sup> Kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).

<sup>9</sup> Kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

mengatur bahwa di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan. Lebih lanjut, pengaturan tentang organisasi mahasiswa secara tegas melarang organisasi ekstra kampus atau partai politik beraktivitas dalam kehidupan kampus, seperti diatur dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 26/Dikti/Kep/2002. Keputusan ini melarang melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus. Kedua kebijakan ini memberikan kerangka dan batasan-batasan tentang aktivitas organisasi mahasiswa.

Problematika yang muncul di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak mampu merespon dinamika dan keberagaman organisasi mahasiswa yang ada. Konflik organisasi mahasiswa seringkali terjadi antara organisasi formal (diakui oleh universitas, fakultas, dan program studi) dengan organisasi non-formal (tidak ada dalam statuta perguruan tinggi). Hal ini disebabkan karena organisasi formal tidak dapat mewadahi aspirasi-aspirasi dan identitas-identitas yang berkembang di mahasiswa. Organisasi intra-kampus cenderung membatasi aspirasi-aspirasi ataupun kepentingan-kepentingan politik mahasiswa di luar kampus. Organisasi mahasiswa seperti HMI, GMNI, PMKRI, KAMMI, LMND, dst merupakan wadah yang mampu menangkap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik sosial mahasiswa. Sementara, organisasi atau himpunan mahasiswa daerah dapat mengakomodasi aspirasi dan kepentingan identitas kedaerahan mereka. Dua jenis organisasi informal ini secara signifikan dapat memerankan fungsi penyalur (*channelling*) bagi kepentingan dan aspirasi mahasiswa ketimbang organisasi formal. Sebab, kapasitas organisasi formal mahasiswa sebatas mencakup seputar persoalan belajar-mengajar semata dengan kapasitas mendesakan yang sangat terbatas. Sederhananya, aspirasi dan kepentingan mahasiswa, baik di dalam dan di luar kampus, dapat didesakan kepada pembuat keputusan universitas/fakultas/program studi melalui organisasi non-formal (ekstra kampus) karena kuatnya jaringan alumni di dalam organisasi tersebut.

Problema-problema yang terekam dalam penelitian ini menyiratkan bahwa tantangan terbesar bagi keberadaan organisasi mahasiswa formal adalah inklusifitas.

Inklusif tidak berarti organisasi mahasiswa mampu merangkul mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk terlibat aktif dalam organisasi, tetapi juga mampu mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan mahasiswa di dalam dan di luar kampus. Harus disadari bahwa kehidupan dan dinamika mahasiswa tidak melulu dideterminasi oleh faktor-faktor yang berada di dalam lingkup kampus semata tetapi juga faktor-faktor yang ada di luar kampus. Lebih lanjut Wakil Rektor UMN memandang perlunya keterlibatan alumni dalam meningkatkan kapasitas organisasi mahasiswa formal melalui peningkatan interaksi antara alumni dan mahasiswa.<sup>10</sup>

Solusi kebijakan lain juga ditawarkan oleh Wakil Rektor UMI, menurutnya demonstrasi dan perkelahian mahasiswa tidak jarang mengusung isu-isu nasional dan lokal ataupun ada keterkaitan antara kepentingan nasional dengan lokal. Misalnya, mahasiswa siap bertumpah darah dalam proses pemilihan ketua BEM, disini bisa dilihat bahwa ada unsur dari luar yang mampu mendominasi unsur yang terjadi dalam kampus. Untuk itu, perguruan tinggi berperan dan juga para birokrat kampus yang mesti merumuskan agar aturan pemilihan BEM dibicarakan secara bersamaan. Hal yang lain adalah tekanan dari lembaga ekstra-kampus juga cukup besar seperti ketika mengadakan demonstrasi. Mahasiswa mengatasnamakan aktivis dan lembaga kampus tapi fakta di lapangan mereka mengenakan jaket organisasi ekstra. Hal ini juga yang merupakan tidak harmonisnya cara mahasiswa dalam memahami pola organisasi kelembagaan. Disini perlu ada hubungan yang baik antara lembaga mahasiswa dan pemantau. Dan hal lain adalah perlu dihadirkan kembali pola seperti P4 yang ditanamkan dalam diri masing-masing mahasiswa dimana pendidikan karakter mesti terbangun.<sup>11</sup>

### *Eksternalitas Perguruan Tinggi*

Berbeda dengan dua isu sebelumnya (kurikulum dan organisasi mahasiswa), kebijakan yang mengatur tentang isu eksternalitas perguruan tinggi belum dibuat secara spesifik. Isu eksternalitas penyelenggaraan perguruan tinggi berkaitan dengan dampak-dampak negatif yang muncul di daerah tempat perguruan tinggi tersebut

<sup>10</sup> Prof Iman Suyitno Wakil Rektor III UMN dalam FGD Wakil Rektor.

<sup>11</sup> Wakil Rektor III UMI Makassar, FGD Wakil Rektor.

beroperasi (Kabupaten/Kota dan Provinsi) sebagai akibat dari penyelenggaraan perguruan tinggi. Kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Kota Makassar yang terjadi dalam dua dekade terakhir memiliki dampak cukup signifikan terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung menurut pandangan pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dan aparat kepolisian sangat merugikan. Infrastruktur dan fasilitas umum-sosial mengalami kerusakan dan stigma 'kota kekerasan' juga sangat merugikan.

Sungguhpun eksternalitas perguruan tinggi terhadap pemerintah daerah begitu nyata, namun hingga saat ini belum ada mekanisme yang efektif dalam menjembatani antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. DPRD Kota Makassar mengaku jarang sekali dilibatkan dalam pembicaraan seputar eksternalitas ini.<sup>12</sup> Hal yang sama juga dirasakan oleh aparat kepolisian. Menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, kasus kekerasan telah 'memakan' korban. Tiga kali Kapolda Sulawesi Selatan dimutasi karena penanganan kasus kekerasan dan perkelahian mahasiswa. Aparat kepolisian mengaku serba salah ketika hendak menangani kekerasan dan perkelahian mahasiswa, terutama saat dihadapkan dengan konsep 'otonomi kampus'. Mahasiswa seringkali berlindung dengan otonomi kampus disaat aparat kepolisian memasuki area kampus saat mencegah dan melerai perkelahian di kampus. Demikian juga dengan pejabat kampus yang terkesan membatasi dan melindungi pelaku-pelaku kekerasan dan perkelahian.

Berangkat dari isu ini maka pembuatan kebijakan yang mengatur hubungan antara perguruan tinggi dengan unsur pemerintahan daerah (Pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, Aparat Kepolisian, dan tokoh masyarakat) menjadi mendesak untuk dirumuskan. Forum wakil rektor bidang kemahasiswa se-Kota Makassar yang pernah dilakukan perlu untuk digagas kembali dengan memperluas aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Forum ini bisa diandalkan untuk mendiskusikan dan memberikan jalan keluar paling ideal tanpa harus mengurangi otoritas dan otonomi dari masing-masing pihak. Kebijakan ini bisa diinisiasi oleh Kementerian

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan anggota DPRD Kota Makassar.

Pendidikan Nasional melalui Dirjen Pendidikan Tinggi ataupun melalui inisiatif dari pemerintah daerah. Solusi kebijakan lainnya menurut Wakil Rektor Unvri mensinergiskan tim penanganan unjuk rasa yang ada pada di Dinasi Kesatuan Kebangsaan (Kesbang) Provinsi.<sup>13</sup>

Peta ketiga isu yang telah dipaparkan di atas (kurikulum, organisasi mahasiswa, dan eksternalitas perguruan tinggi) secara ringkas akan dijabarkan di dalam tabel berikut.

---

<sup>13</sup> Wakil Rektor III Unvri, FGD Wakil Rektor.

Tabel 3. PETA MASALAH DAN ALTERNATIF SOLUSI KEBIJAKAN

Isu Kebijakan	Permasalahan	Alternatif Solusi	Inisiator Kebijakan
Kurikulum	<p>1. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan Keagamaan) belum mampu menyentuh secara lebih mendalam atas praktek-praktek kehidupan sehari-hari mahasiswa sebagai warganegara dan individu beragama.</p> <p>1.1. Ketiga matakuliah ini juga masih dianggap sebagai matakuliah (minor) tidak terlalu penting sehingga minat dan keseriusan mahasiswa untuk mengikuti matakuliah ini sangat rendah;</p> <p>1.2. Penyusunan silabus tiga matakuliah ini kurang beresonansi atau sinergi dengan matakuliah-matakuliah yang sifatnya kognitif (MKK dan MKB) dan afektif (MPB dan MBB). Sehingga mahasiswa tidak menemukan relevansi antara ketiga matakuliah tersebut dengan matakuliah lainnya.</p> <p>1.3. Ketiga matakuliah masuk dalam matakuliah wajib universitas (dikelola oleh universitas) akibatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini sangat besar (kelas besar).</p> <p>2. Lemahnya pembahasan dan analisa yang bersifat inter-disiplin. Alih-alih meningkatkan interaksi antar-disiplin ilmu, kecenderungan yang terjadi adalah sistem pengajaran dan pendidikan di tiap perguruan tinggi justru memperkuat sekat-sekat</p>	<p>1. Efektifitas internalisasi nilai-nilai keberagaman, toleransi (terhadap perbedaan identitas dan keilmuan), dan resolusi konflik serta perdamaian di dalam setiap matakuliah.</p> <p>1.1. Peningkatan pembobotan matakuliah MPK.</p> <p>1.2. Kesesuaian dan koherensi matakuliah MPK dengan matakuliah lainnya.</p> <p>1.3. Memperkecil jumlah mahasiswa dalam kelas MPK.</p> <p>2. <i>Encounter</i> ataupun interaksi antar-disiplin keilmuan dalam bentuk pembahasan dan analisa interdisiplin keilmuan untuk mentransformasikan ide-ide tentang keberagaman, toleransi (terhadap perbedaan identitas dan keilmuan), dan resolusi konflik serta perdamaian.</p> <p>2.1. Pembuatan matakuliah lintas fakultas.</p> <p>2.2. Pemberian materi analisa lintas disiplin ilmu pada matakuliah tertentu.</p> <p>2.3. Kerjasama pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat lintas fakultas.</p> <p>3. Modifikasi kebijakan kurikulum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirjen Dikti</li> <li>• Universitas</li> <li>• Fakultas</li> <li>• Program Studi</li> <li>• Mahasiswa</li> </ul>

Isu Kebijakan	Permasalahan	Alternatif Solusi	Inisiator Kebijakan
Organisasi Kemahasiswaan	<p>bidang keilmuan. Masing-masing bidang ilmu menunjukkan superioritasnya dengan cara menegaskan keberadaan manfaat dan kontribusi bidang-bidang ilmu lainnya.</p> <p>3. Kebijakan yang ada belum mampu mentransformasi nilai nilai keberagaman, toleransi (terhadap perbedaan identitas dan keilmuan), dan resolusi konflik serta perdamaian</p>	<p>1. Memperluas fungsi dan kewenangan organisasi formal (intra-kampus).</p> <p>1.1. Memperluas interaksi antara organisasi intra-kampus dan ekstra-kampus sembari mempertegas batasan kewenangan dan cakupan aktivitas pada masing-masing organisasi.</p> <p>1.2. Memperluas dan meningkatkan aktifitas anggota organisasi mahasiswa intra-kampus.</p> <p>1.3. Memperluas akses organisasi intra-kampus dalam pembuatan kebijakan program studi, fakultas, dan universitas.</p> <p>1.4. Menambah anggaran organisasi kampus dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi.</p> <p>2. Memperkuat jejaring alumni organisasi intra-kampus.</p> <p>2.1. Membentuk forum alumni organisasi mahasiswa formal (intra-kampus).</p> <p>2.2. Memberikan nilai tambah bagi calon <u>tenaga pengajar (dosen)</u> dan peneliti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirjen Dikti</li> <li>• Universitas</li> <li>• Fakultas</li> <li>• Program Studi</li> <li>• Mahasiswa</li> <li>• Alumni</li> </ul>

Isu Kebijakan	Permasalahan	Alternatif Solusi	Insistator Kebijakan
<p>Eksternalitas Perguruan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan perguruan tinggi selain memunculkan eksternalitas positif bagi pemerintah daerah, juga menghasilkan eksternalitas negatif bagi pemerintah daerah.</li> <li>Belum ada mekanisme efektif dan komunikasi intensif para pemangku kebijakan pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah.</li> <li>Berbeda dengan dua isu sebelumnya (kurikulum dan organisasi mahasiswa), kebijakan yang mengatur tentang isu eksternalitas perguruan tinggi belum dibuat secara spesifik..</li> </ol>	<p>yang pernah aktif di organisasi intra-kampus,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Modifikasi kebijakan organisasi kemahasiswaan</li> <li>Perlu kesepahaman berkaitan dengan eksternalitas negatif antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan re-konseptualisasi otonomi kampus.</li> <li>Merumuskan eksternalisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi.</li> </ol> </li> <li>Mengaktifkan dan mensinergiskan lembaga lembaga komunikasi lintas stakeholder.                     <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghidupkan kembali forum wakil rektor se-Kota Makassar dengan catatan memperluas keterlibatan stakeholder.</li> <li>Mengaktifkan tim penanganan unjuk rasa Kesbang Provinsi.</li> </ol> </li> <li>Membuat kebijakan baru berkaitan dengan eksternalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirjen Dikti</li> <li>Universitas</li> <li>Pemerintah daerah</li> <li>Tokoh masyarakat</li> <li>Mahasiswa</li> </ul>

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

**A**nalisa dan elaborasi pada bagian terdahulu telah menemukan beberapa kebaruan dalam memahami dan memproblematisasi kekerasan mahasiswa; mengidentifikasi celah-celah dalam kebijakan atau regulasi yang ada; dan menawarkan model kebijakan serta alternatif solusi kebijakan kekerasan mahasiswa di Kota Makassar. Secara singkat temuan dan analisa/elaborasi tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- Dalam studi kebijakan, perumusan dan pendefinisian persoalan kebijakan sangat menentukan efektifitas dari produk kebijakan yang dihasilkan. Historisitas dan karakteristik kekerasan mahasiswa di Kota Makassar tidak dapat dipandang sebagai persoalan kebijakan yang sederhana (*tame problem*) melainkan persoalan kebijakan yang kompleks atau bapet (*wicked problem*). Kecenderungan yang dapat ditangkap melalui analisa kebijakan pendidikan yang ada menunjukkan bahwa masalah kekerasan mahasiswa hanya ditempatkan sebagai masalah kebijakan yang sederhana/biasa. Akibatnya produk kebijakan yang ada tidak cukup mampu menanggulangi dan menghentikan spiral kekerasan mahasiswa di Kota Makassar.
- Komprehensifitas dari analisa kekerasan dalam kasus kekerasan dan vandalisme mahasiswa di Kota Makassar hanya memberikan porsi pembobotan analisa dari perspektif akar masalah. Akibatnya produk kebijakan yang dihasilkan cenderung hanya menjawab pada permukaannya saja, seperti: mengalihkan perhatian mahasiswa melalui aktifitas kemahasiswaan sehingga tidak melakukan kekerasan; memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan, dan 'mempersalahkan' budaya dan tindakan kekerasan mahasiswa. Dengan memperluas pendekatan (melampaui) akar permasalahan melalui pendekatan kekerasan sebagai strategi, maka cakrawala kekerasan mahasiswa menjadi lebih luas. Pendekatan kekerasan

sebagai strategi menunjukkan bahwa kekerasan mahasiswa bukanlah semata-mata sebagai dampak dari dislokasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik melainkan kekerasan sebagai metode dan strategi untuk menyampaikan aspirasi dan mewujudkan kepentingannya. Berdasarkan pendekatan ini maka fokus dari solusi kebijakannya adalah menghentikan kekerasan sebagai strategi atau metode dan memberikan alternatif strategi/metode yang efektif dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan mahasiswa.

- Model pembuatan kebijakan pendidikan yang bertujuan mengatasi persoalan kekerasan mahasiswa (*wicked problem*) tidak dapat menggunakan cara tahapan pembuatan kebijakan yang linier melainkan menempatkan proses pembuatan kebijakan sebagai proses politik. Pembuatan kebijakan sebagai proses politik dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa dimensi-dimensi kebijakan, yaitu dimensi kognitif, instrumental, dan normatif pada setiap tahapan kebijakan.
- Kebijakan pendidikan nir-kekerasan untuk menghentikan dan mengantisipasi praktek kekerasan mahasiswa mengerucut pada tiga isu kebijakan, yaitu kurikulum, organisasi mahasiswa, dan eksternalitas pendidikan tinggi. Solusi kebijakan untuk bidang kurikulum terletak ada tiga upaya, yaitu: a) internalisasi nilai-nilai keberagaman, toleransi (terhadap perbedaan identitas dan keilmuan), dan resolusi konflik serta perdamaian; b) interaksi dan encounter disiplin keilmuan melalui analisa inter-disipliner; c) memodifikasi kebijakan kurikulum. Solusi kebijakan untuk organisasi mahasiswa terletak pada tiga aspek, yaitu: a) memperluas fungsi dan kewenangan organisasi formal (intra-kampus). B) memperkuat jejaring alumni organisasi intra-kampus; c) memodifikasi kebijakan organisasi kemahasiswaan. Solusi kebijakan pada eksternalisasi perguruan tinggi adalah a) meningkatkan kesepahaman berkaitan dengan eksternalitas negatif antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah dan masyarakat; b) mengaktifkan dan mensinergiskan lembaga-lembaga komunikasi

lintas stakeholder; c) membuat kebijakan baru berkaitan dengan eksternalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti dan A.T Ramli (2011) *Konstruksi Sosial Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing.
- Arent, Hannah. (1969). *On Violence*. Harvest Books New York: Harcourt, Brace and World.
- Ashutosh Varshney, Rizal Panggabean, Mohammad Zulfan Tadjoeeddin. (2004) "Patterns of Collective Violence in Indonesia, 1990-2003, Working paper series (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery).
- Commonwealth of Australia. (2007) *Tackling Wicked Problems: A Public Policy Perspective*, Australian Public Service.
- Connolly, E. William (1991). *Identity/Difference: Democratic Negotiation of Political Paradox*. University of Minnesota Press.
- Creswell, John W, (2002). "*Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches (Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif)*", terj: Angkatan III & IV KIK-UI dan bekerja sama dengan Nur Khabibah, Kata Pengantar: Parsudi Suparlan, Jakarta: Penerbit KIK Press.
- Eller, David. (2006). *Violence and Culture: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach*. Thomson and Wadsworth.
- Grindle, M. and Thomas, J. (1990) 'After the Decision: Implementing Policy Reforms in Developing Countries'. *World Development*. Vol. 18 (8).
- Harris, Ian and Synott John (2002) 'Peace Education for a New Century' *Social Alternatives* 21(1):3-6.
- Keane, John. (2004) *Violence and Democracy*. Cambridge University Press.
- Klinken, Gerry van. (2007) *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. KITLV dan Pustaka Pelajar.
- Laclau, E. (1991). "Community and Its Paradoxes: Richard Rorty's "Liberal Utopia"" i M. T. Collective. *Community at Loose Ends*. Minneapolis, University of Minnesota Press
- McAdam, D., Tarrow, S. dan Tilly, c. (2001) *Dynamics of Contention*, Cambridge: New York: Cambridge University Press.
- Page, James S. (2008) *Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical Foundations*. Charlotte: Information Age Publication.
- Rebecca Sutton, *The Policy Process: An Overview, Working Paper 118*, London: Overseas Development Institute.

Sahab, Ali dan Muzaqqi, Fahrul (2011). *Analisa Kultural-Politik Kekerasan Mahasiswa di Kota Makassar*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing.

Santoso, Purwo. (2004) *Dimensi-Dimensi dalam Kebijakan Publik*. Makalah.

Schmidt and Schroder (2001). *Anthropology of Violence and Conflict*. Routledge.

### Regulasi

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi,

Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus,

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,

Surat Keputusan Dirjen Dikti No: 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Surat Keputusan Dirjen Dikti No: 44/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.